BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Sejarah Kabupaten Sidoarjo dimulai tepatnya pada tahun 1851 daerah Sidoarjo bernama Sidokare, bagian dari Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin oleh seorang Patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung Pucang Anom yang dibantu oleh seorang Wedana. Ialah Bagus Ranuwiryo yang berdiam di kampung Pangabahan.

Pada tahun 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Dengan demikian Kabupaten Sidokare tidak lagi menjadi daerah bagian dari Kabupaten Surabaya. Sejak itu mulai diangkat seorang Bupati untuk memimpin Kabupaten Sidokare yaitu R. Notopuro (R. T. P. Tjokronegoro) berasal dari Kasepuhan, putera R. A. P Tjokronegoro Bupati Surabaya, dan bertempat tinggal di kampung Pandean (sebelah selatan Pasar Lama sekarang), beliau mendirikan masjid di Pekauman (Masjid Abror sekarang), sedang alun-alunya pada waktu itu adalah Pasar Lama.

Dalam tahun 1859 itu juga, dengan berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 10/1859 tanggal 28 Mei 1859 Staatsblad. 1859 nama Kabupaten Sidokare diganti dengan Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara resmi terbentuknya daerah Kabupaten Sidoarjo adalah tangal 28 Mei 1859 dan sebagai Bupati I adalah R. Notopuro (R. T. P Tjokronegoro). Pada masa itu, Sidokare dipimpin R. Notopuro (bergelar R. T. P Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan. Beliau adalah putra dari R. A. P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya. Berikut ini adalah daftar Bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Sidoarjo sejak masa awal kemerdekaan Indonesia: 33

- 1. R. T. Tjokronegoro 1 1859-1863.
- 2. R. T. Tjokronegoro 2 1863-1883.
- 3. Sumodirejo 1883 (wafat tiga bulan kemudian).
- 4. R. A. A. P. Tjondronegoro 1 1883-1906.
- 5. R. A. A. P. Tjondronegoro 2 1906-1924.
- 6. Sumodiputro 1926-1932.
- 7. Kosong 1932-1933.
- 8. R. A. A. Soejadi 1933-1947.
- 9. K. Ng. Soebakti Pusponoto 1947-1949.
- 10. Soeharto 1949-1950.
- 11. R. Soeriadi Kertoprojo 1950-1958.
- 12. H. A. Choedori Amir 1958-1959.
- 13. R. H. Samadikoen 1959-1964.
- 14. H. R. Soedarsono 1965-1975.
- 15. H. Soewandi 1975-1985.

³² http://pondokwage.sidoarjo.org, diakses tanggal 31-10-2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³³ M. Bahrul Amig, *Jejak Sidoarjo*, (Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo, 2006), 114.

- 16. Soegondo 1985-1990.
- 17. Edhi Sanyoto 1990-1995.
- 18. Soedjito 1995-2000.
- 19. Bupati Drs. Win Hendrarso, Wakil Bupati H. Saiful Ilah, S.H 2000-2005.
- Bupati Drs. Win Hendrarso, Wakil Bupati H. Saiful Ilah, S.H 2005-2010.
- 21. Saiful Ilah, S.H., M.Hum (2010-sekarang).³⁴

Secara geografis Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,5-112,90 Bujur Timur dan 7,3-7,50 Lintang Selatan dengan kisaran suhu antara 20-350C. Letak yang berada di sekitar garis khatulistiwa membuat Kabupaten Sidoarjo mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dimana musim kemarau berkisar antara bulan Mei sampai bulan September, dan musim penghujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2010-2015 memiliki visi untuk mencapai Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan; Untuk mencapai visi tersebut program pembangunan yang direncanakan akan mengacu pada misi yang dijalankan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan fokus pada pengembangan sektor ekonomi dan juga pengembangan sumberdaya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri.

-

³⁴ http://sidoarjokab.go.id, diakses tanggal 31-10-2014.

Berdasarkan maksud yang terkandung dalam visi di atas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan delapan misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, adapun delapan misi utama kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah:

- Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
- Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM dan juga Koperasi secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
- 4. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan juga kesetaraan gender.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.
- 6. Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- 7. Meningkatkan kualitas dan juga pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

8. Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat.

2. Gambaran Umum Peta Politik di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, perkembangan partai politik di Kabupaten Sidoarjo mengikuti perkembangan partai politik tingkat nasional. Secara kuantitatif, jumlah partai politik perserta pemilu 2014 cenderung lebih menurun dibanding pemilu 2009 berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo pada pemilu 2009 tercatat 44 partai politik yang ikut bertarung memperebutkan kursi legislatif dan hanya 9 partai yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.1

DPRD Kabupaten Sidoarjo 2009-2014

Partai	Kursi
Hanura	3
Gerindra	2
PKS	3
PAN	8
PKB	10
Golkar	4
PDIP	7
Demokrat	11
PKNU	2
Total	50

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo

Adapun jumlah calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Sidoarjo pada pemilu 2014 seluruhnya berjumlah 530 orang yaitu 323 orang caleg laki-laki dan 207 orang caleg perempuan dan yang sudah berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sebanyak 50 kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Ada 29 anggota legislatif yang merupakan wajah baru. Sementara 21 lainnya adalah anggota legislatif *incumbent*. Namun sayang keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo belum mencapai kuota 30%. Hanya ada 7 anggota legislatif perempuan yang berhasil mendapatkan jatah kursi di dewan.

Tabel 4.2

DPRD Kabupaten Sidoarjo 2014-2019

Partai	Kursi
Nasdem	1
PKB	13
PKS	3
PDIP	8
Golkar	5
Gerindra	7
Demokrat	4
PAN	7
PPP	1
PBB	1
Total	50

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo

3. Profil Partai Pengusung Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

a. Partai Gerindra

Partai Gerindra didirikan pada tanggal 6 Februari 2008 oleh Prabowo Subianto. Partai Gerindra didirikan untuk melakukan perubahan besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam sosialisasi politiknya Partai Gerindra mengusung tema keberpihakan kepada rakyat kecil atau lebih populer dengan sebutan *wong cilik*.

Meski termasuk Partai baru, namun Partai Gerindra tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada pemilu legislatif 2009, Partai Gerindra mampu meloloskan 4 wakilnya di DPRD Kabupaten Sidoarjo, dan kemudian meningkat 6% menjadi 7 orang pada pemilu legislatif 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto ini dapat diterima dengan baik di masyarakat, tidak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo.

Di Kabupaten Sidoarjo, DPC Partai Gerindra berada di Perum Mutiara Timur Blok X No. 1. DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Mohamad Rifa'i. Selain menjadi ketua di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, Mohamad Rifa'i juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019.

Pada proses pencalonan anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, Partai Gerindra menyertakan 50 caleg yang tersebar di 6 daerah pemilihan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Komposisi caleg terdiri dari 31 caleg laki-laki dan juga 19 caleg perempuan. Jumlah pencalonan caleg perempuan ini telah memenuhi persyaratan pencalonan caleg perempuan dan ketentuan kuota minimal 30%.

Adapun jumlah caleg dari Partai Gerindra yang lolos pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 7 orang yang terdiri dari 6 caleg laki-laki dan juga 1 caleg perempuan. Sementara jumlah caleg yang gagal berjumlah 43 orang yang terdiri dari 25 caleg laki-laki dan juga 18 caleg perempuan. Meskipun hanya mampu meloloskan 7 wakilnya ke parlemen, namun Partai Gerindra sudah mampu untuk membentuk Fraksinya sendiri di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

b. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai fraksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itu wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai "Rumah Besar Umat Islam."

Di Kabupaten Sidoarjo, DPC PPP beralamat di Jl. Raya Lingkar Timur Kav. Blok D No. 1. DPC PPP Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Umi Khaddah yang juga merupakan seorang anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Umi Khaddah telah memimpin PPP selama 5 tahun terakhir, yakni sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Pada proses pencalonan anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, PPP menyertakan 23 caleg yang tersebar di 6 daerah pemilihan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Komposisi caleg terdiri dari 11 caleg laki-laki dan juga 12 caleg perempuan. Jumlah pencalonan caleg perempuan ini telah memenuhi persyaratan pencalonan caleg perempuan dan ketentuan kuota minimal 30%.

Adapun jumlah caleg dari PPP yang lolos pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo hanya berjumlah 1 orang caleg perempuan, sementara 11 caleg perempuan yang lain serta 11 caleg laki-laki yang lain dapat dikatakan gagal lolos ke parlemen.

Meski PPP termasuk partai yang sudah lama sekali malang melintang di dunia perpolitikan di Indonesia, namun itu tidak menjamin berhasilnya calon anggota legislatif yang diusung oleh Partai berlambang Ka'bah tersebut duduk di parlemen.

c. Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu partai politik besar di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar

berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta pemilu.

Di Kabupaten Sidoarjo, DPD Partai Golkar sudah berdiri sangat lama yakni sejak tahun 1974. Sejak tahun 1974 sampai sekarang, DPD Partai Golkar tetap berdiri di alamat yang sama, yakni di Jl. Ahmad Yani No. 17, Sidoarjo. Saat ini DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Warih Andono, yang juga merupakan seorang anggota DPRD periode 2014-2019 Kabupaten Sidoarjo.

Untuk calon anggota legislatif yang akan mereka ajukan ke KPU, Partai Golkar di Kabupaten Sidoarjo mengikuti aras nasional, yakni minimal harus menjadi kader Partai selama 5 tahun berturut-turut. Selain itu untuk Kabupaten Sidoarjo, Partai Golkar hanya akan memilih caleg berdasarkan tingkat pendidikan caleg tersebut yakni minimal Strata 1 (S1). Hal ini dilakukan guna menjamin tingkat kualitas, kecerdasan, serta pola pikir dari caleg tersebut.

Pada proses pencalonan anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, Partai Golkar menyertakan 50 caleg yang tersebar di 6 daerah pemilihan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Komposisi caleg terdiri dari 31 caleg laki-laki dan juga 19 caleg perempuan. Jumlah pencalonan caleg perempuan ini telah memenuhi persyaratan pencalonan caleg perempuan minimal 30%.

Namun sayang pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo Partai Beringin ini hanya mampu meloloskan 5 caleg ke parlemen, yang terdiri dari 4 caleg laki-laki dan 1 caleg perempuan. Adapun jumlah caleg yang gagal yakni berjumlah 27 caleg laki-laki dan 18 caleg perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas serta tingkat pendidikan yang diagung-agungkan Partai Golkar untuk menunjukkan kualitas calegnya, belum tentu menjadi penentu pemenangan saat pemilu.

d. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik berideologi konservatisme di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah). Partai ini dideklarasikan oleh para Kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan juga A. Muhith Muzadi.

PKB memiliki massa yang banyak, terutama sekali di Jawa Timur. Di Kabupaten Sidoarjo, DPC PKB beralamat di Jl. Airlangga No. 1. Partai ini diketuai oleh Saiful Ilah, yang juga merupakan seorang Bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2015.

Pada proses pencalonan anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, PKB menyertakan 50 caleg yang tersebar di 6 daerah pemilihan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Komposisi caleg terdiri dari 31 caleg laki-laki dan juga 19 caleg perempuan. Jumlah pencalonan caleg perempuan ini telah memenuhi persyaratan pencalonan caleg perempuan dan ketentuan kuota minimal 30%.

Meski sempat menargetkan 20 kursi dari 50 kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo, PKB hanya mampu meraih 13 kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Adapun caleg laki-laki yang berhasil lolos ke parlemen berjumlah 12 orang, sedangkan yang gagal berjumlah 19 orang. Sedangkan caleg perempuan yang berhasil lolos berjumlah 1 orang dan caleg perempuan yang gagal lolos dalam pemilu berjumlah 18 orang.

Meskipun jauh dari jumlah kursi yang ditargetkan, namun PKB merupakan Partai yang paling banyak meloloskan wakilnya ke parlemen dan hal ini semakin menegaskan bahwa PKB merupakan salah satu partai yang paling berpengaruh di Jawa Timur, tak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo.

e. Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas insiatif Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 September 2001. Partai Demokrat memiliki azas atau ideologi Nasionalis-Religius. Nasionalis artinya bersifat horizontal, sedangkan religius artinya vertikal atau menuju ke atas, ke sang Khalik atau sang Pencipta.

Di Kabupaten Sidoarjo, DPC Partai Demokrat beralamat di Perum Magersari Blok Y No. 23. Di Kabupaten Sidoarjo, partai ini dipimpin oleh Sarto, yang merupakan Ayah dari Juana Sari, salah satu anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, jumlah anggota legislatif yang lolos dari Partai Demokrat

mengalami penurunan sebesar 6% bila dibandingkan dengan pemilu legislatif 2009.

Pada proses pencalonan anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, Partai Demokrat menyertakan 48 caleg yang tersebar di 6 daerah pemilihan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Komposisi caleg terdiri dari 30 caleg laki-laki dan juga 18 caleg perempuan. Jumlah pencalonan caleg perempuan ini telah memenuhi persyaratan pencalonan caleg perempuan dan ketentuan kuota minimal 30%.

Adapun jumlah caleg dari Partai Demokrat yang lolos pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 caleg laki-laki dan juga 3 caleg perempuan, sedangkan jumlah caleg yang gagal berjumlah 44 orang yang terdiri dari 29 caleg laki-laki dan 15 caleg perempuan.

Meskipun hanya mampu meloloskan 4 wakilnya ke parlemen, akan tetapi Partai Demokrat merupakan satu-satunya partai yang paling banyak meloloskan caleg perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

4. Profil Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

a. Dra. Hj. Ainun Jariyah

Beliau merupakan caleg dengan nomor urut 1 yang lolos dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sekaligus caleg perempuan yang lolos dengan suara terbanyak yaitu sebesar 10.738 suara, melampaui enam anggota legislatif terpilih perempuan yang lainnya. Anak kelima dari tujuh bersaudara pasangan Anwar dan juga Siti Khodijah ini lahir di Sidoarjo pada tanggal 6 Juni 1964. Sebelum menjadi anggota dewan, beliau merupakan seorang guru di STM Dharma Wirawan Tanggulangin selama 21 tahun.

Riwayat pendidikan beliau dimulai dari MI Fajar Shodiq Tulangan, SMP Hasyim Assari Sidoarjo dan SMA Gadjah Mada Krembung, kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni di IKIP PGRI Kediri dengan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Pernikahan Ainun Jariyah dengan Hj. Muhammad Rudhi yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini telah dikaruniai 3 orang anak, yakni Muhammad Wahyu Anggawan (26), Rizka Nova Amelia (21), dan juga Muhammad Izra Al-Farobi (16).

Ainun Jariyah dikenal sangat aktif di lembaga sosial keagamaan. Beliau pernah menjadi Ketua Muslimat Tanggulangin Fatayat Cabang Sidoarjo, Bendahara YKN, dan Ketua IHM se-Tanggulangin. Hal ini lah yang membuat beliau cukup dikenal di daerahnya.

Ainun Jariyah telah menjadi anggota PKB selama 10 tahun terakhir, sejak tahun 2004. Di DPC PKB Sidoarjo, beliau sempat memegang jabatan sebagai Bendahara II. Saat ini, beliau tinggal di Dusun Wates RT 06/RW 02 Kedensari Kecamatan Tanggulangin.

b. Drg. Hj. Sulistyowati Nurul K.

Drg. Hj. Sulistyowati Nurul K. atau yang lebih akrab disapa dengan nama Sulistyowati ini merupakan caleg dengan nomor urut 5 dari Partai Golkar. Beliau mewakili dapil 2, yang terdiri dari daerah Jabon, Krembung, Prambon dan Porong. Sulistyowati menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di tanah kelahirannya, yakni Lumajang, sebelum memutuskan untuk *hijrah* ke Surabaya dan berkuliah di Universitas Airlangga dengan mengambil jurusan Kedokteran Gigi.

Kelahiran 19 Maret 1964 ini telah menikah dengan Agung Semiharto yang berprofesi sebagai Wiraswasta dan telah dikaruniai dua orang anak, yakni Santania Abrani dan Salsabila.

Anak pertama dari pasangan Bambang Tedjo Suwono dan Maisaroh ini berhasil mengumpulkan 3.866 suara pada pemilu legislatif 2014 kemarin dan berhasil lolos menjadi anggota dewan. Meskipun Sulistyowati saat ini tinggal di Deltasari Baru Casabella No. 79 RT 33/RW 06 Ngingas, Kecamatan Waru, beliau sudah tidak asing lagi dengan daerah pemilihannya, yakni Porong. Hal ini dikarenakan jiwa

sosial beliau yang begitu tinggi, sehingga pada tahun 2009, beliau memutuskan untuk membuka klinik As-Syifa di Jl. Bhayangkari, No. 534, Juwet Kenongo, Porong, Sidoarjo.

Alasan beliau membuka klinik di daerah tersebut adalah karena Porong merupakan daerah bencana sehingga membutuhkan penanganan kesehatan yang lebih dibandingkan daerah lain. Dengan sendirinya Sulistyowati bertemu dengan banyak pasien dari latar belakang yang berbeda yang akhirnya mengusik dan lalu menggugah hatinya. Dengan alasan itu pula-lah beliau kemudian memutuskan untuk menerima ajakan Partai Golkar pada tahun 2009 untuk menjadi anggota atau kader Partai dan kemudian mengajukan diri menjadi wakil rakyat pada pemilu legislatif 2014.

Di Partai Golkar sendiri, Sulistyowati memangku jabatan sebagai Ketua Bagian Pemberdayaan Perempuan.

c. Hj. Yunik Nur Aini

Lahir di Sidoarjo, 31 Oktober 1985, dengan nomor urut 3 Partai Gerindra yang mewakili dapil 5, yaitu daerah Waru dan Taman. Pada pemilu legislatif 2014 kemarin, Yunik Nur Aini berhasil mengumpulkan suara sebesar 9.351 suara. Perolehan suara yang Yunik Nur Aini dapatkan merupakan perolehan suara terbesar kedua untuk anggota legislatif terpilih perempuan, di bawah Ainun Jariyah.

Yunik Nur Aini merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Hj. Yunus dan juga Hj. Kholifah. Beliau merupakan orang tua tunggal dari Muhammad Rian Ardiansyah. Saat ini beliau berprofesi sebagai Pengusaha, sehingga tidaklah heran bila beliau lebih dikenal sebagai *business woman* dari pada sebagai seorang politisi partai.

Sebelum bergabung dengan DPC Partai Gerindra Sidoarjo 1 tahun lalu, Yunik Nur Aini merupakan mantan Pengurus PKB Waru, Wakil Ketua Karang Taruna dan bendahara di Fatayat Waru. Di DPC Partai Gerindra Sidoarjo sendiri, beliau memegang posisi sebagai wakil bendahara. Saat ini, beliau tinggal di Tambak Sawah RT 06/RW 02 Kecamatan Waru.

d. Enny Survani, S.H.

Lahir di Sidoarjo 14 Maret 1969. Beliau merupakan caleg dengan nomor urut 7 dari Partai Demokrat mewakili dapil 4 yang terdiri dari daerah Wonoayu, Tulangan dan Sukodono. Dalam pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo kemarin, beliau berhasil mengumpulkan 3.869 suara, yang membuatnya bisa kembali duduk di kursi dewan.

Beliau merupakan putri ketiga dari tujuh bersaudara dari Ani Suyono. Enny Suryani kemudian menikah dengan Fachtur Rosyid yang merupakan mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Maka tidaklah

heran, sebelum bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2014, beliau sudah terlebih dulu aktif di PKNU sejak tahun 2009.

Beliau sebenarnya bukan wajah baru di Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo ini. Beliau telah duduk menjadi anggota dewan periode 2009-2014 di DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui PKNU. Hanya saja, karena tahun ini PKNU tidak bisa lolos di Pencalonan Legislatif karena terkendala kuota 30% keterwakilan perempuan, maka dari itu Enny Suryani memutuskan untuk pindah ke Partai Demokrat.

Ibu dari Nuril Hidayatussolihah (23) dan juga Muhammad Muhid Nur Fadillah (9) ini memulai pendidikannya di SDN Ganting, Gedangan, sebelum melanjutkan Sekolah Menengah Pertama-nya di SMP Dharmawanita 1. Gedangan. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi; Beliau menamatkan Strata 1 (S1) di IKIP PGRI Surabaya dengan mengambil jurusan Biologi; Tidak puas hanya dengan menuntut ilmu di satu tempat, beliau juga menuntut ilmu di Universitas Merdeka dengan mengambil ilmu hukum. Setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya di dua tempat sekaligus, Enny Suryani pun melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Narotama Surabaya dengan mengambil jurusan Magister Kenotariatan.

Sebelum menjadi anggota dewan untuk pertama kalinya pada tahun 2009, beliau sempat mengajar menjadi Guru di SMP YPM 4 Boar,

Taman. Dalam keorganisasian, Enny Suryani sempat menjadi Ketua Tim Penggerak PKK dari tahun 1994 hingga tahun 2001. Saat ini beliau tinggal di desa Kloposepuluh RT 20/RW 05, Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono.

e. Juana Sari, S.T.

Juana Sari merupakan anggota legislatif terpilih perempuan kedua pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari Partai Demokrat. Juana Sari merupakan caleg dengan nomor urut 1 yang mewakili dapil 5 yang terdiri dari daerah Waru dan juga Taman. Beliau merupakan caleg *incumbent* dari Partai Demokrat yang berhasil merebut kembali kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo setelah berhasil mengumpulkan suara sebesar 6.558 suara.

Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sarto dan juga Sri Lestari ini sudah tidak asing lagi dengan dunia politik. Selain karena beliau pernah menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014, sang Ayah, Sarto, juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Sidoarjo. Saat ini beliau dan suami, Ari Afriadi, yang berprofesi sebagai Angkatan Laut ini tinggal di Perum Pondok Candra Melon Utara 2, No. 42, Sidoarjo.

Lahir di Surabaya, 2 Desember 1984, Juana Sari memulai pendidikan dasarnya di SD Brebek, Waru, sebelum melanjutkan di SMP 3 Waru. Lulus SMP, beliau melanjutkan Sekolah Menengah Atas-nya di

SMA 3 Sidoarjo. Lulus dari SMA 3 Sidoarjo, Juana Sari memutuskan untuk mengambil jurusan Teknik Sipil di Insitut Teknologi Surabaya (ITS).

Sebelum duduk menjadi anggota dewan untuk pertama kalinya pada tahun 2009, Juana Sari berprofesi sebagai seorang Kontraktor. Selain itu Juana Sari juga merupakan anggota dari LSM DWCW atau Delta *Coruption Watch Coorperation*. Di DPC Partai Demokrat Sidoarjo sendiri, Juana Sari memegang posisi sebagai Bendahara partai.

Beliau menjadi anggota Partai Demokrat sejak tahun 2007 di usia yang relatif muda, yakni 23 tahun.

f. Hj. Nunuk Lelarosanawati, S.H.

Merupakan caleg *incumbent* ketiga dari Partai Demokrat yang berhasil lolos kembali di DPRD Kabupaten Sidoarjo setelah berhasil mengumpulkan 4.132 suara. Beliau merupakan caleg dengan nomor urut 3, yang mewakili dapil 6, yang terdiri dari daerah Gedangan, Buduran dan juga Sedati. Beliau merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Ahmam Sarkun dan Lele Wula.

Dunia politik sendiri bukanlah dunia yang asing bagi Nunuk Lelarosanawati dikarenakan sang Ayah, Ahmam Sarkun, merupakan anggota dewan dari Partai ABRI pada tahun 1990-an.

Lahir di Jombang 22 Februari 1957, Nunuk Lelarosanawati memulai pendidikan Sekolah Dasar di Banyuwangi, sebelum memutuskan untuk

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas-nya di Jember. Tamat dari SMA, beliau kemudian memutuskan untuk *hijrah* ke Surabaya. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Kartini dengan mengambil jurusan hukum.

Beliau telah bergabung di DPC Partai Demokat Sidoarjo sejak tahun 2004. Di DPC Partai Demokrat Sidoarjo, beliau sempat memegang jabatan sebagai sekretaris sebelum akhirnya memegang jabatan sebagai Wakil Ketua. Di sela-sela kesibukannya menjadi anggota dewan, beliau selalu menyempatkan diri untuk mengurus usaha Restoran dan juga Katering yang telah dibangunnya selama 11 tahun terahir.

Saat ini, Nunuk Lelarosanawati tinggal di Puri Surya Jaya B5 No. 20 RT 02/RW 11 Kecamatan Gedangan.

g. Hj. Umi Khaddah, S.Pd.I

Umi Khaddah adalah satu-satunya anggota legislatif yang berhasil lolos pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), setelah 3 periode PPP gagal meloloskan calegnya di parlemen. Saat pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, beliau berhasil mengumpulkan 3.347 suara dari dapil 5 yang terdiri dari Daerah Waru dan Taman. Lahir di Sidoarjo, 5 November 1969, beliau merupakan caleg dengan nomor urut pertama.

Saat ini beliau tinggal di Jl. Raya Sawunggaling RT 10/RW 01 Jemundo Kecamatan Taman. Riwayat pendidikan Umi Khaddah sendiri sebagian besar dilalui di kota kelahirannya, Sidoarjo. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama beliau diselesaikan di SMP Wachid Hasyim, Sepanjang, sebelum melanjutkan Pendidikan di SMA Wachid Hasyim, Sepanjang, setelah itu beliau meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Sekolah Pendidikan Islam dengan mengambil jurusan Pendidikan Islam.

Umi Khaddah dikenal sebagai pribadi yang ramah dan juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, terutama dalam bidang politik. Umi Khaddah merupakan Kepala Desa 3 periode di Jemundo, Sukodono. Selain itu beliau juga aktif di Partai Persatuan Pembangunan sejak tahun 2007 sampai tahun 2009 dengan memegang posisi Bendahara, sebelum akhirnya menjadi Ketua DPC PPP Sidoarjo dari tahun 2009 sampai sekarang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsolidasi Partai Terhadap Anggota Legislatif Terpilih Perempuan
 Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

a. Penerapan Ketentuan Kuota 30% di Pencalonan Legislatif Partai Pengusung Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

Peningkatan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen sangat penting untuk direfleksikan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik karena akan membuat perempuan lebih berdaya untuk dapat terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapatkan perhatian, utamanya terkait dengan kesetaraan dan juga keadilan gender di berbagai aspek kehidupan yang selama ini termarginalkan. Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara serta publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir *holistic* dan responsif gender.

Dalam keterkaitannya mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan, kelima partai pengusung anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 telah memenuhi kuota 30%. Hal ini dikarenakan apabila partai tersebut tidak bisa memenuhi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan maka akan dianggap hangus oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan akhirnya mereka tidak bisa mengikuti pemilu. Meskipun demikian, kelima partai pengusung anggota legislatif terpilih perempuan di Kabupaten Sidoarjo memiliki respon

yang cukup baik terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan, bahkan ada partai yang memprioritaskan perempuan.

Berikut pernyataan Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo, terkait respon partai terhadap caleg perempuan.

"Kami selalu memprioritaskan. Di partai kami sudah ada aturan nggak bisa dilanggar. Jadi setiap tiga pencalonan bagaimana yang diatur oleh undang-undang, setiap nomor 1, 2, 3 ini harus ada nomornya perempuan. Kalau misalnya 2, maka 1 harus perempuan. Jadi kalau dua, dua-duanya laki-laki ya nggak boleh. Tapi kalau kita disini ini kembali, jadi di antara caleg-caleg nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, ini harus ada perempuan. Boleh perempuan diletakkan nomor 1, boleh nomor 2, boleh nomor 3, setelah tiga tadi ada perempuan lagi. Jadi kalau jumlah calonnya itu ada 6, berarti harus ada 2 perempuan, 4 laki-laki. Kalau nggak dicoret oleh negara karena undang-undang."

Hal senada juga diutarakan oleh keempat partai pengusung anggota legislatif terpilih perempuan yang lain terkait respon partai terhadap caleg perempuan.

"Responnya dari DPC PKB sangat-sangat maksimal karena aturan undang-undang pemilu legislatif itu dari 30% kurang satu saja dicoret." 36

"Kalau dari partai Demokrat, tidak memandang istilahnya itu laki-laki ataupun perempuan – tidak memandang gender. Jadi laki-laki perempuan kita utamakan asal mempunyai kriteria, dan kualitas. Dari penampilan dan istilahnya dari jenjang dia di partai demokrat."³⁷

2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁵ Wawancara dengan Margono, selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo, 17 Desember 2014.

Wawancara dengan Sumaiyah, selaku Wakil Bendahara DPC PKB Sidoarjo, 12 Desember 2014.
 Wawancara dengan Hajoko, selaku Ketua Bappilu DPC Partai Demokrat Sidoarjo, 2 Desember

"Baik, karena memang dibutuhkan saat sekarang itu kan kewajiban pencalonan legislatif kan harus ada keterwakilan 30%." 38

Gerindra, bahkan mengungkapkan bila caleg perempuan merupakan ujung tombak partai.

"(Sangat baik) Perempuan (bahkan merupakan) ujung tombak (partai) karena lebih konsisten." ³⁹

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat jelas bahwa kelima partai pengusung masing-masing anggota legislatif terpilih perempuan merespon dengan baik terkait kebijakan afirmatif. Namun respon yang baik saja tidaklah cukup. Partai juga harus memiliki srategi yang baik dalam merekrut caleg perempuan agar jumlah caleg perempuan tidak hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas.

Berikut pernyataan Sokeh terkait strategi yang dilakukan DPC Gerindra Sidoarjo dalam memilih caleg perempuan.

"Melalui DPC, PAC, prioritas simpatisan. Seperti kemarin, peminatnya 200 orang (caleg laki-laki maupun perempuan), diseleksi tahapnya ketat; Administrasi, legalitas, loyalitas, harus aktif di masyarakat dan di cek di lapangan; Jadi keterwakilan perempuan benar-benar dilihat dari sisi kualitas dan ini bisa dilihat dari pengecekan yang dilakukan tim Gerindra secara diam-diam di lapangan; Tim Gerindra akan mendekati masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal caleg, dan menanyakan bagaimana caleg tersebut di (mata) masyarakat, tidak pernah keluar rumah, misal, atau

³⁸ Wawancara dengan Umi Khaddah selaku Ketua DPC PPP Sidoarjo, 5 Desember 2014.

³⁹ Wawancara dengan Sokeh, selaku anggota DPC Partai Gerindra Sidoarjo, 4 Desember 2014.

justru malah sangat berbaur dengan masyarakat. Yang berperan (dalam penetapan bakal caleg sementara) Ketua DPC dan juga Sekretaris. Itu setelah diverifikasi oleh Badan Seleksi Bappilu."⁴⁰

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh partai pengusung anggota legislatif terpilih perempuan yang lain.

"Kalau di Golkar itu nggak sesulit gitu (mencari caleg perempuan). Karena pertama kalau di Golkar itu dalam pencalegan tidak memungut biaya, sehingga siapa pun asalkan persyaratannya memenuhi boleh. Persyaratannya yang pertama mereka adalah sebagai kader partai selama lima tahun berturut-turut dia tidak terputus, terus yang kedua pendidikan kader, karena partai kita partai kader ya, jadi dia mengikuti, namanya diklat kader, ya ini harus diikuti, yang ketiga, dia tidak tercela segala macam, orang baik-baik. Jadi semua yang putri-putri itu diambilkan dari pengurus-pengurus partai, nah pengurus partai (juga) sudah ada aturannya, harus 30% perempuan. Jelas (dari) kualitas, dan saya (lebih) mengutamakan yang sarjana pada waktu itu yang perempuan, kalau yang nggak sarjana nggak lah. Nah, pada saat penetapan caleg yang berhak menentukan itu Ketua dan juga Sekretaris, Bappilu hanya mengusulkan. Patokannya berdasarkan PDLT vaitu Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela."41

"(Dilakukan) penyeleksian yang cukup ketat. Tidak masalah mendapatkan sedikit caleg, asal berkualitas. (Yang menentukan) itu digodok dari tim pencalegan, musyawarah dengan panitia sembilan. Panitia sembilan sendiri terdiri dari Ketua DPC, Wakil Ketua DPC, Sekretaris pelindung, Wakil sekretaris, Bendahara, wakil bendahara, ketua Bappilu, wakil ketua Bappilu, penasehat. Tetapi itu tidak mutlak, hanya di DPC Sidoarjo saja, di tempat (DPC Demokrat yang lain) bisa berbeda." ⁴²

"Memang dari (kader) partai sendiri awalnya nggak ada yang mau. Percuma kan ribut sehingga dikasih motivasi dari DPC

-

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Wawancara dengan Margono, selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo, 17 Desember 2014.

Wawancara dengan Hajoko, selaku Ketua Bappilu DPC Partai Demokrat Sidoarjo, 2 Desember 2014.

minimal karena aturan keterwakilan 30% itu wajib diikuti maka apabila *sampean* (kami) selaku kader tidak mau nyaleg maka otomatis ya semuanya akan gagal – kalau gagal berarti gagal seluruhnya, bahkan kepartaiannya. Maka *sampean* (kami) selaku kader perempuan ya harus mau untuk jadi caleg. Sebetulnya yang dipakai adalah kualitas – mutunya dia – bukan kuantitas. Kualitas. Tetapi meskipun kualitas kalau uangnya kan banyak, dia punya kemampuan (secara finansial), tapi dia *ndak* mau (ya percuma). (Yang menentukan) Ya ada tim 9, tapi kemarin itu tidak ada tim 9, hanya tim 5; Kemarin itu Ketua, sekretaris dewan suro (pengambil kebijakan), ketua, sekretaris dewan panpit (pelaksana) dan satu keterwakilan perempuan."⁴³

Namun, hal yang sedkit berbeda disampaikan oleh Hj. Umi Khaddah terkait strategi yang dilakukan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sidoarjo dalam memilih caleg perempuan.

"Kemarin itu kan sulitnya harus mendatangi ke salah satu caleg perempuan. Ada yang memang mendaftarkan sendiri, ada yang memang saya cari. Perempuan itu kalau ke politik itu kan masih (berpikiran) lebih baik mencalonkan ke yang lain dari pada ke caleg. Saya membutuhkan angka, caleg yang berpotensi, apa yang berpengalaman. Yang (menentukan daftar caleg) saya kan saya ketuanya."

Hal ini dapat dimaklumi, mengingat PPP tengah dirundung konflik internal sehingga berimbas kepada sedikitnya minat caleg untuk mencalonkan diri melalui partai berlambang Ka'bah tersebut. Namun meskipun termasuk sulit mendapatkan caleg, khususnya caleg perempuan, dari segi kualitas, maupun kuantitas, PPP tetap menerapkan

-

⁴³ Wawancara dengan Sumaiyah, selaku Wakil Bendahara DPC PKB Sidoarjo, 12 Desember 2014.

⁴⁴ Wawancara dengan Umi Khaddah selaku Ketua DPC PPP Sidoarjo, 5 Desember 2014.

syarat-syarat tersendiri terkait penyusunan bakal caleg. Berikut pernyataan ketua DPC PPP Sidoarjo terkait penyusunan bakal caleg.

"(Syarat-syaratnya) kesehatan, kelakuan baik, ijazah terakhir, dan umur juga harus di atas 25 tahun." 45

Hal yang senada juga diungkapkan oleh dua partai pengusung anggota legislatif terpilih perempuan yang lain.

"Minimal SMA, berbadan sehat, tidak pernah memiliki kasus hukum." 46

"Pendidikan minimal (SMA), kesehatan, kelakuan."⁴⁷

Namun berbeda dengan ketiga partai di atas, Golkar dan PKB memiliki klasifikasi tersendiri terkait syarat-syarat penetapan penyusunan bakal caleg.

"Persyaratannya yang pertama mereka adalah sebagai kader partai selama lima tahun berturut-turut dia tidak terputus, terus yang kedua pendidikan kader, karena partai kita partai kader ya, jadi dia mengikuti, namanya diklat kader, ya ini harus diikuti, yang ketiga, dia tidak tercela segala macam, orang baik-baik."

.

⁴⁵ Ihid

⁴⁶ Wawancara dengan Sokeh, selaku anggota DPC Partai Gerindra Sidoarjo, 4 Desember 2014.

⁴⁷ Wawancara dengan Hajoko, selaku Ketua Bappilu DPC Partai Demokrat Sidoarjo, 2 Desember 2014.

⁴⁸ Wawancara dengan Margono, selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo, 17 Desember 2014.

"Ya satu kualitasnya, yang kedua jabatan di kepengurusan, (lalu) *performance*." ⁴⁹

Meskipun jumlah perempuan yang ingin terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri pada saat pemilu tidak sebanding dengan jumlah lakilaki, namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah sebagian besar partai pengusung masing-masing anggota legislatif terpilih perempuan di Kabupaten Sidoarjo untuk lebih memilih caleg – khususnya caleg perempuan – yang tidak hanya berdasarkan kepada kuantitas, tetapi juga kualitas.

Hal ini merupakan suatu yang wajar karena pembicaraan mengenai sistem kuota sendiri memang masih begitu banyak menimbulkan pro dan kontra. Seperti yang dikatakan oleh Melanie Reyes, sistem kuota ini, adalah sebuah pilihan antara mendapatkan kutukan dan anugerah⁵⁰; Di satu sisi, sistem kuota pada dasarnya meletakkan presentase minimum bagi kedua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, untuk memastikan adanya keseimbangan posisi dan peran gender dari keduanya dalam dunia politik; Sebaliknya di sisi yang lain, bagi pihak-pihak yang menentangnya, sistem kuota ini pada dasarnya tidak memiliki basis hukum yang kuat alias tidak konstitusional. Belum lagi pernyataan yang menyatakan bahwa sistem kuota bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan bahkan merendahkan kemampuan perempuan itu sendiri karena hanya akan melahirkan stigma negatif bahwa kedudukan

_

Wawancara dengan Sumaiyah, selaku Wakil Bendahara DPC PKB Sidoarjo, 12 Desember 2014.
 Melanie Reyes, *The Quota System: Women's Boon or Bane? The Centre For Legislative Development.* Vol. 1, No. 3, April 2000.

perempuan dalam lembaga parlemen atau partai politik bukan karena kemampuan sendiri namun akibat dari diberlakukannya sistem kuota.

Penyiapan Caleg Perempuan dari Partai Pengusung Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

Seiring dengan gelombang demokrasi di seluruh dunia, konsekuensi yang muncul adalah semakin ditekannya aspek transparansi dan kebebasan masyarakat untuk terikat dan mengikatkan diri pada suatu partai politik atau kontestan individu tertentu. Konsekuensi logis dalam hal ini adalah bahwa persaingan yang *fair* semakin dituntut dilaksanakan oleh partai politik dan juga kontestan selama pemilu. Hal-hal ini semakin meningkatkan intensitas persaingan antara partai politik atau antara kontestan individu guna memperebutkan hati masyarakat.

Di sinilah dibutuhkan penyiapan dari masing-masing partai untuk meningkatkan kapabilitas seorang caleg agar mampu bersaing dan merebut hati masyarakat. Setelah proses penetapan siapa saja yang menjadi caleg dan penetapan nomor urut, mendekati pemilu, konsolidasi yang dilakukan masing-masing partai semakin intensif terutama pada saat berkampanye. Akan tetapi jauh sebelumnya penyiapan seorang caleg dilaksanakan melalui pengkaderan partai ataupun pendidikan politik.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bappilu DPC Partai Demokrat Sidoarjo.

"Antara perempuan dan laki-laki sama. Ada pengkaderan, pelatihan. (Selain itu) ini istilahnya menyangkut baliho, *pamflet*, *banner*, bendera dan lain sebagainya itu di-*support* dari partai. (Juga) bimbingan teknis. Perkenalan yang supel, anggap kita sebagai calon pejabat, jangan urakan, (dapat) menempatkan diri sebagai pemimpin." ⁵¹

Pernyataan Ketua Bappilu DPC Partai Demokrat Sidoarjo itu disetujui oleh Juana Sari, selaku anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana berikut:

"Kalau dukungannya dukungan program-program itu. Kalau ada dukungan kaus kadang-kadang kan. Pin-pin, ya itu-itu saja. Kaus dari partai, *banner* juga biayanya. Ya karena partai kan juga pengen menang kan jadi kan supaya menang apa minimal orang mengenal (caleg dari partai tersebut). Partainya ini ada. Demokrat ini ada loh di mana-mana begitu."⁵²

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Enny Suryani:

"Kita semuanya (para caleg dari Partai Demokrat) juga dikasih untuk biaya *banner*."53

Hal yang sedikit berbeda disampaikan oleh tiga partai yang lain terkait dukungan yang mereka berikan kepada para calegnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵¹ Wawancara dengan Hajoko, selaku Ketua Bappilu DPC Partai Demokrat Sidoarjo, 2 Desember 2014

⁵² Wawancara dengan Juana Sari, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 18 Desember 2014.

⁵³ Wawancara dengan Enny Suryani, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 15 Desember 2014.

"Semuanya sama. Baik perempuan maupun laki-laki. Kalau materi nggak ada. Partai hanya menghantarkan mereka untuk tepat ke pemilih, setelah itu dia sendiri. Selama proses pendaftaran di KPU itu yang menanggung partai. Selama ada proses hukum yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran (caleg) (itu yang menanggung juga partai). (Selain itu) melakukan pendidikan politik yang dibiayai sendiri oleh para caleg yang kita lakukan 3 bulan sebelum pencalegan dan juga pendaftaran." 54

"Pengkaderan, kepengurusan dikirim ke GOR, pelatihan-pelatihan, pertemuan-pertemuan, pembinaan, dan kunjungan. Selain pelatihan, juga mengikuti PIRA (Perempuan Indonesia Raya), khusus untuk caleg perempuan. Harus turun ke rakyat langsung. Kegiatannya pembinaan masyarakat secara ekonomi. Misalnya seperti (pembuatan) telor asin, pembuatan baju manik-manik, revolusi putih ke SD/TK bagi-bagi susu dan penyerapan aspirasi – kegiatannya rutin dan dilaporkan ke DPP."

"Ada itu kalau calegnya kan sudah ada kunjungan kerja, ada badan musyawarah, ada penganggaran, ada pelaksananya sendiri, tapi kalau di DPC PKB sendiri itu minimal satu tahun dua kali untuk pendidikan politiknya." ⁵⁶

Begitu pula dengan Ketua DPC PPP Sidoarjo, berikut pernyataannya:

"Termasuk semua caleg. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Pertemuan (pelatihan kader), nggak *ngoyo-ngoyo*, kalau kita sudah punya pelatihan yang (bisa) disosialisasikan pada masyarakat. (Kami) mensosialisasikan. Semua caleg harus kuat harus mampu untuk berkampanye."⁵⁷

_

⁵⁴ Wawancara dengan Margono, selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo, 17 Desember 2014

⁵⁵ Wawancara dengan Agus, selaku bagian Sekretariat DPC Partai Gerindra Sidoarjo, 4 Desember 2014

⁵⁶ Wawancara dengan Sumaiyah, selaku Wakil Bendahara DPC PKB Sidoarjo, 12 Desember 2014.

⁵⁷ Wawancara dengan Umi Khaddah selaku Ketua DPC PPP Sidoarjo, 5 Desember 2014.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyiapan yang dilakukan oleh masing-masing partai dapat dikategorikan penyiapan yang standar. Selain pengkaderan, pelatihan dan juga pendidikan politik, partai juga menuntut para caleg untuk bisa terjun langsung ke masyarakat. Tetapi dibandingkan ke-empat partai yang lain, Demokrat merupakan partai yang paling berani memberikan dukungan tidak hanya dalam bentuk moril, tetapi juga materiil kepada calegnya seperti dalam bentuk baliho, *pamflet*, *banner*, pin, kaus dan juga bendera.

Dukungan dalam bentuk materi sangat dibutuhkan oleh para caleg, terutama sekali caleg perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik memang masih membutuhkan dukungan *financial* dan *network* yang kuat. Perempuan adalah pendatang baru yang memiliki keterbatasan memobilisasi uang, informasi, serta pendukung.

Melihat upaya serta penyiapan caleg yang dilakukan oleh Partai Demokrat, maka tidaklah heran bahwa pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, Demokrat menjadi satu-satunya partai yang paling banyak meloloskan caleg perempuan ke parlemen.

c. Fungsi Bappilu Terhadap Caleg Perempuan

Setiap partai berkepentingan dan berjuang keras untuk meraih sebanyak-banyaknya suara rakyat dalam pemilihan. Perolehan suara di

semua daerah pemilihan inilah yang menentukan berapa banyak kursi yang diraih di parlemen. Untuk mewujudkannya, maka dapat dipastikan bahwa di setiap partai politik terdapat Badan Pemenangan Pemilu.

Bappilu bertujuan untuk membuat strategi politik yang tepat guna meraih suara sebanyak-banyaknya. Melalui strategi yang tepat dan juga didukung komitmen yang kuat maka kepastian terhadap pencapaian tujuan tinggal bergantung pada langkah-langkah politik yang dilakukan. Bagaimana membangun suatu keyakinan bersama dalam meretas jalan yang akan dilalui, bagaimana menyusun sebuah strategi gerakan, bagaimana mempertahankan suatu gerakan dan mengatasi masalah yang muncul, serta bagaimana menjalankan strategi hingga pada tataran taktis menjadi tahapan penting yang perlu dipahami oleh setiap pelaku.

Tetapi berdasarkan hasil temuan penelitian, Bappilu hanya akan fokus terhadap partai dan bukan khusus untuk masing-masing caleg seperti yang diungkapkan kelima partai ini.

"Jadi gini ya... Bappilu itu, Badan Pemenangan Pemilihan Umum, kalau di kami itu BKPP namanya - Badan Koordinasi Pemenangan Pemilihan Umum – fokusnya itu terhadap bagaimana pemenangan partai, terus juga memberi pembelajaran kepada caleg tentang bagaimana cara-cara melakukan recruitment suara. Jadi dia ini membuat rencana strategi, namanya RenStra dan membuat RenSop, rencana operasionalnya."58

⁵⁸ Wawancara dengan Margono, selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo, 17 Desember 2014.

"Umum, seluruh caleg, jadi tidak boleh memihak salah satu caleg sekalipun dia itu Ketua, anaknya Ketua, Ketua Bappilu, atau bahkan anak Ketua Bappilu itu sendiri." ⁵⁹

"Di Partai itu ada istilahnya Tim Pemenangan di DPC PKB itu resmi. Tim Pemenangan itu terdiri dari Ketua, Sekretaris, bendahara, di bawahnya ada anggota-anggota, kalau di caleg itu ya ada tim sukses. Aturannya di sini kalau di DPC PKB harus bukan caleg (tim pemenangan) sehingga dia (bisa) netral." 60

"Jadi Bappilu itu (jelas) lebih fokus ke partai."61

Tetapi hal yang sedikit berbeda disampaikan oleh Ketua DPC PPP Sidoarjo terkait fungsi Bappilu di PPP.

"Sebetulnya saya selaku ketua DPC kemarin, itu ada istilahnya tim pemenangan pemilu. Dengan adanya PPP ya itu saya (kunjungi) juga dapil-dapil, istilahnya orang-orang yang potensi. Jadi istilahnya badan pemenangan pemilu ada tapi nggak fungsi. Ya nggak jalan kan, karena apa, wong kita juga ngomong beberapa kali (saat pidato) gini, gini, saya sering disela gini, 'wes stop ketua, ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon,' (oleh kader partai PPP DPC Sidoarjo sendiri). Istilahnya perempuan itu apa ya banyak malunya tapi perjuangan itu kan apa pun sepahit apa pun tetap sampaikan, tetap diperintahkan, diterima atau tidak, mau apa tidak ya tidak urusan yang penting kan tetep istilahnya masalah pemenangan pemilu itu tetep tetapi nggak jalan."

Berbeda dengan pernyataan keempat partai lainnya, PPP dengan blak-blakan mengakui apa adanya bahwa tidak adanya rasa hormat terhadap Ketua DPC PPP Sidoarjo, yang kebetulan merupakan seorang

_

⁵⁹ Wawancara dengan Hajoko, selaku Ketua Bappilu DPC Partai Demokrat Sidoarjo, 2 Desember 2014

⁶⁰ Wawancara dengan Sumaiyah, selaku Wakil Bendahara DPC PKB Sidoarjo, 12 Desember 2014.

⁶¹ Wawancara dengan Suwono, selaku Ketua Bappilu DPC Partai Gerindra Sidoarjo, 10 Desember 2014

⁶² Wawancara dengan Umi Khaddah selaku Ketua DPC PPP Sidoarjo, 5 Desember 2014.

perempuan, menjadi kendala tidak berfungsinya Badan Pemenangan Pemilu di Partai tersebut.

Namun berdasarkan pernyataan empat partai yang lain, jelas bahwa Bappilu hanya akan fokus terhadap partai – bukan khusus untuk masingmasing caleg. Caleg harus berusaha sendiri tidak mengandalkan partainya. Akan tetapi yang harus diingat adalah bahwa partailah yangmengusung para caleg, sehingga seorang caleg tidak akan bisa terlepas dari pengaruh partainya.

2. Implementasi Platform Partai Pada Anggota Legislatif Terpilih Perempuan

Platform politik adalah serangkaian prinsip atau kebijakan yang didukung oleh partai politik, kelompok tertentu, atau praktisi politik perorangan. Platform ini bisa digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dalam pemilihan umum, seperti dengan diungkapkannya dukungan bagi, atau penentangan terhadap suatu topik kontroversial. Selain itu, juga bisa digunakan untuk melihat kesamaan atau perbedaan prinsip dan kebijakan yang dapat dipertimbangkan saat membentuk koalisi. 63

Dalam bingkai pemilu, maka para juru kampanye sebuah partai wajib menguasai betul pesan utama *platform* yang ingin diperjuangkannya. Kemudian mengkomunikasikan semua pesan itu kepada masyarakat konstituen secara baik. Pilihan-pilihan kata yang tepat, metode penyampaian

_

⁶³ http://id.wikipedia.org, diakses tanggal 2-9-2014.

yang menarik, dan pemaparan bukti-bukti yang meyakinkan akan mengarahkan pilihan suara konstituen.

Dalam keadaan seperti ini, pemilih dapat memilih antara dasar ideologi dan *platform* partai-partai yang bersaing dan juga dalam sistem partai yang kuat, akan ada batas yang jelas pada setiap pegangan partai. Karenanya, partai politik yang dipilih atas dasar kebijakan mereka, harus dinilai sejauh mana mampu menerapkan *platform* yang mereka kampanyekan.⁶⁴ Secara realita, implementasi *platform* partai yang terwujud dalam visi misi dan program yang ditawarkan para caleg diakui cukup berpengaruh terhadap perolehan suara yang mereka dapatkan.

Berikut pernyataan Enny Suryani selaku anggota legislatif terpilih perempuan dari Partai Demokrat terkait implemetasi *platform* partai.

"Iya, *insya allah* (visi-misi dan program kerja yang ditawarkan cukup berpengaruh). Kemarin itu memang karena kita ada pokok-pokok pikiran anggota dewan, itu semua saya sampaikan saya berikan apa yang menjadi isu dari tim saya, konstituen saya, ya *alhamdulilah* ter-*cover* semuanya sehingga mereka juga merasakan apa yang jadi isu (tersebut). Ya kalau visi-misi saya kita sebagai perempuan harus bangkit. Harus bisa mewakili dari keterwakilan perempuan. Kalau kita merasa ada pelayanan (umum) yang kurang itu (baik), khususnya Ibu, tulis surat aja *ndak* pa-pa tapi yang jelas nama alamat sehingga kita bisa mengetahui."

Hal senada juga diungkapkan anggota legislatif terpilih perempuan yang lain.

⁶⁵ Wawancara dengan Enny Suryani, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 15 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶⁴ Norm Kelly, Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Washington DC: National Democratic Institute, 2011), 8.

"Kalau visi-misinya untuk membantu masyarakat yang di bawah, agar aspirasinya tercapai. (Visi-misi itu) pengaruh juga. Cuma dari caleg lain juga banyak program-program (yang serupa atau bahkan lebih variatif) gitu." 66

"Memperjuangkan dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim). Ya perempuan itu kan (bagaimanapun) tarung di lapangan itu kan ya susah. Kalau kita visi misinya nggak jelas ya tambah susah. Ya cukup berpengaruh. Tergantung orangnya, kembali lagi."67

Apabila visi-misi dan program yang ditawarkan oleh ketiga anggota legislatif terpilih perempuan di atas lebih condong kepada faktor eksternal, maka berbeda hal-nya dengan Nunuk Lelarosanawati, yang lebih menekankan faktor internal ketika memaparkan visi misi.

"Program kerja saya itu harus bersinergi dengan DPR Pusat. Itu yang kita jalankan. Ya, (cukup) pengaruh (terhadap hasil perolehan suara yang didapatkan)." ⁶⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, sebagai seorang caleg *incumbent*, Nunuk Lelarosanawati ingin menyinergikan DPRD Kabupaten dengan DPR Pusat. Hal ini agar, baik DPRD Kabupaten maupun DPR Pusat bisa terjalin keselarasan. Visi misi yang lebih mengedepankan faktor internal tersebut diakui oleh Nunuk Lelarosanawati cukup berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang beliau dapatkan, sehingga beliau bisa kembali

Wawancara dengan Umi Khaddah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 5 Desember 2014

_

⁶⁶ Wawancara dengan Yunik Nur Aini, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 10 Desember 2014

⁶⁸ Wawancara dengan Nunuk Lelarosanawati, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 23 Desember 2014.

mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk duduk kembali sebagai anggota dewan.

Tetapi, ada pula anggota legislatif terpilih perempuan yang menyelaraskan visi-misi dan program-program yang mereka tawarkan ketika berkampanye, sesuai *background* atau latar belakang anggota legislatif terpilih perempuan tersebut.

"Kalau kemarin itu waktu saya kampanye itu waktu itu saya mengadakan fogging – jadi pembasmian nyamuk. Jadi waktu itu fogging itu kan untuk membasmi demam berdarah. Sambil saya melakukan fogging saya melakukan pendekatan dengan masyarakat. Jadi saya tidak berkampanye, tapi memberikan pengertian tentang masalah penyakit atau sharing lingkungan, itu saja yang saya tanamkan. Mereka tidak perlu politik, ya kan, masyarakat itu kan yang penting itu kan (dari) tindakan dan (program itu) sangat berpengaruh." ⁶⁹

"Saya hanya ingin untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan karena saya kan lama berkecimpung di pendidikan sehingga saya itu awalnya tertarik di komisi saya itu ke dewan itu kan saya sering keliling Sidoarjo, lihat anak-anak kecil, usia sekolah yang pada dasarnya masih harus mengenyam pendidikan, di pinggir jalan, kok (begitu) aja itu terenyuh. Kapan ya saya bisa mengusulkan dan bisa mengangkat ya bagaimana pun anak-anak itu kan generasi (bangsa) ya. Jadi itu awal-awalnya ya seperti itu. (Tetapi itu) *ndak* seberapa (berpengaruh). Soalnya apa, orang-orang (sudah) tahu figur saya sebelumnya."⁷⁰

Berdasarkan kedua pernyataan di atas, terlihat jelas bahwa visi-misi mengenai kesadaran masyarakat akan kesehatan yang diusung oleh Sulistyowati yang memang adalah seorang dokter ini mampu untuk menarik

Wawancara dengan Ainun Jariyah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 13 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶⁹ Wawancara dengan Sulistyowati Nurul K, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 23 Desember 2014.

minat masyarakat sehingga masyarakat memberi kepercayaan kepada beliau untuk duduk menjadi anggota dewan.

Tetapi hal yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Ainun Jariyah. Meskipun latar belakang beliau adalah sebagai seorang guru, dan beliau memiliki visi-misi mulia untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi Ainun Jariyah mengakui bila visi-misi yang beliau tawarkan kepada masyarakat tersebut tidak cukup berpengaruh di masyarakat. Dalam pernyataan di atas, Ainun Jariyah menekankan figur seorang caleg lebih memiliki pengaruh ketimbang visi-misi yang diusungnya.

Tetapi, apabila keenam anggota legislatif terpilih perempuan di atas mampu menjelaskan visi misi yang mereka usung dengan baik, maka lain halnya dengan Juana Sari, yang lebih memaparkan tantangan yang akan dihadapi anggota DPRD ketika memperjuangkan visi misi ataupun program kerja masing-masing anggota di parlemen.

"Kalau visi misi ya antara Bupati dengan DPR itu berbeda. Kalau Bupati visi misi ketika nanti dia jadi dia pasti bisa merealisasikan, tapi kalau DPR itu belum tentu. Jadi karena apa? Karena DPR itu tugasnya tiga. Legislasi, *controlling, budgetting*. Jadi kadang-kadang kita seadanya visi-misinya untuk penanggulangan kemiskinan terutama ya tapi kenyataannya di situ teman-temannya beralasan lain '*ah nggak ini nggak prioritas, yang prioritas itu ini untuk pengangguran atau apa gitu*'. Akhirnya ini tersisihkan karena di sini tuh kita sendiri belum tentu bisa berhasil memperjuangkan milik kita, karena kita harus berkoalisi harus bekerjasama."⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Juana Sari, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 18 Desember 2014.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa visi-misi yang diusung oleh setiap caleg ketika berkampanye pada akhirnya harus mengalami perdebatan yang panjang di parlemen. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan pendapat, mana yang lebih dulu harus diprioritaskan. Sehingga, Juana Sari menekankan bahwa pada akhirnya, apabila seorang anggota legislatif tidak mampu memperjuangkan visi misi yang diusungnya saat berkampanye, maka anggota legislatif tersebut harus berkoalisi maupun bekerjasama dengan anggota legislatif yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa implementasi platform partai yang terwujud dalam visi misi dan program-program yang ditawarkan oleh anggota legislatif terpilih perempuan sebagian besar memang masih memiliki pengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo cukup memperdulikan visi misi dan juga program yang ditawarkan oleh para caleg, khususnya caleg perempuan. Tetapi, tidak hanya visi misi ataupun program yang ditawarkan oleh caleg, figur seorang caleg juga turut memiliki andil.

Pandangan ini sesuai dengan pendapat Agung Wibawanto⁷² bahwa pada umumnya perilaku pemilih dari masyarakat Indonesia bercirikan bahwa personalitas tokoh lebih penting dari pada kedalaman renungan dan juga pikiran-pikiran segarnya. Namun, perjuangan anggota legislatif terpilih perempuan tidak hanya sampai disitu. Kandidat yang berhasil harus siap berasimilasi dalam kelompok partai yang ada pada badan legislatif,

⁷² Agung Wibawanto, *Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat; Strategi dan Taktik Menang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Pembaruan 2005), 19-20.

berdasarkan identifikasi partai mereka karena hal tersebut akan memfasilitasi tindakan parlemen yang terkoordinasi dan memberikan suatu pemahaman yang jelas pada warga negara tentang bagaimana suara mereka telah diterjemahkan ke dalam keterwakilan.⁷³

3. Peluang Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

Peluang adalah suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti. Setiap anggota legislatif terpilih perempuan memiliki peluang yang berbeda-beda pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo. Ada yang menganggap bahwa kebijakan afirmatif dengan sistem suara terbanyak merupakan peluang untuk caleg perempuan terjun di dunia politik. Hal ini karena kebijakan afirmatif dengan sistem suara terbanyak akan menambah semangat baru bagi perempuan karena tidak lagi menjadi *get voter* di dalam pemilu. Hal ini sebagaimana dijelaskan:

"Betul (menjadi peluang) karena apa suara terbanyak ini kan benarbenar membuat kita berjuang di masyarakat. Terus juga memperjuangkan istilahnya kalau lewat perempuan mungkin aspirasi dari masyarakat ya itu kan bisa lebih luwes, disampaikan langsung. Itu kan kalau perempuan sama perempuan itu kan *insya allah* lebih enak, lebih ngerti, paham, nggak ada takutnya." ⁷⁴

Apabila Umi Khaddah menganggap kebijakan afirmatif dengan sistem suara terbanyak sebagai peluang untuk mengikuti pemilu karena akan

Yawancara dengan Umi Khaddah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 5 Desember 2014.

_

⁷³ Norm Kelly, Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Washington DC: National Democratic Institute, 2011), 3.

membuatnya menjadi lebih dekat dengan masyarakat atau calon pemilih, maka lain halnya dengan ketiga anggota legislatif terpilih perempuan berikut yang menganggap figur atau sosok diri sendiri di mata masyarakat sebagai peluang saat mengikuti pemilu, sebagaimana pernyataan berikut:

"Orang-orang sudah tahu figur saya sebelumnya (di lembaga sosial keagamaan); Jadi secara nggak langsung itu merupakan peluang bagi saya terjun di dunia politik." "75

"Ya itu tadi, terjun secara langsung. Kalau misalkan dia (calon pemilih) sakit, yang nganter (ke Rumah Sakit) itu anak saya. Jadi mbak peluang itu ada karena figur saya di mata masyarakat."⁷⁶

"Pada suatu saat itu ada penawaran dari Askes untuk mendirikan klinik, tapi mau buka klinik di mana, di Porong, semua nggak ada yang mau karena mereka beranggapan bahwa 'daerah bencana bahaya saya ndak mau buka di situ' tetapi pemikiran saya berbeda dengan mereka. Pemikiran saya justru daerah bencana itu butuh klinik, butuh penanganan, butuh bantuan-bantuan, itu niat saya. Ternyata memang benar-benar klinik saya disitu dibutuhkan dan sekarang ya alhamdulilah membawa berkah (secara tidak langsung juga memberi peluang mengingat lokasi klinik serta daerah pemilihan berada di wilayah yang sama)."

Hal yang kurang lebih sama juga diungkapkan oleh kedua anggota legislatif terpilih perempuan yang lain, berikut pernyataannya:

"Karena walau saya belum nyaleg kalau ada orang yang membutuhkan kalau saya mampu ya *tak* kasih. Jadi iya betul

Yawancara dengan Ainun Jariyah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 13 Desember 2014.

Wawancara dengan Nunuk Lelarosanawati, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 23 Desember 2014.

⁷⁷ Wawancara dengan Sulistyowati Nurul K, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 23 Desember 2014.

kekonsistenan itu. Nah dari situ kan muncul kepercayaan (masyarakat) sehingga ada (peluang)."⁷⁸

"Karena selama ini saya sendiri kalau ada reses semuanya kan sering saya undang sehingga mereka-mereka ini (calon pemilih) masih ada keterikatan ya (peluang), makanya kemarin itu kalau saya nggak maju, mereka masih mengharapkan saya maju." ⁷⁹

Apabila anggota legislatif terpilih perempuan di atas lebih menonjolkan figur serta kekonsistenan untuk meraih peluang serta pemenangan politik pada saat pemilu, maka lain halnya dengan Juana Sari, yang merupakan seorang caleg *incumbent*, yang lebih menonjolkan kinerjanya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014 sebagai peluang untuk meraih simpati dari masyarakat, sebagaimana pernyataan berikut:

"Program-program saya sebelumnya, kinerja saya (saat menjadi anggota dewan periode 2009-2014 di DPRD Kabupaten Sidoarjo)."80

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota legisltif terpilih perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang yang beragam pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo. Umi Khaddah menyatakan bahwa kebijakan afirmatif dengan sistem suara terbanyak membuat beliau menjadi lebih dekat dengan masyarakat, yang kemudian hal itu menjadi peluang untuk beliau meraih pemenangan politik. Hal ini mungkin tidak akan terjadi apabila sistem politik di Indonesia masih

⁷⁹ Wawancara dengan Enny Suryani, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 15 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁷⁸ Wawancara dengan Yunik Nur Aini, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 10 Desember 2014.

⁸⁰ Wawancara dengan Juana Sari, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 18 Desember 2014.

menggunakan sistem nomor urut. Lain halnya dengan Umi Khaddah; Ainun Jariyah, Nunuk Lelarosanawati, Sulistyowati, Yunik Nur Aini, dan juga Enny Suryani mengakui bahwa peluang ada karena figur mereka di mata masyarakat. Sedangkan Juana Sari berpendapat bahwa peluang yang ia dapatkan ketika pemilu legislatif 2014 kemarin berasal dari kinerja serta program-program kerja yang beliau lakukan saat masih menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014.

Berdasarkan uraian di atas, peluang-peluang anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, dapat digambarkan dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Peluang Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014
di Kabupaten Sidoarjo

Peluang		
Kebijakan Afirmatif dengan sistem suara terbanyak		
Figur		
Kinerja		

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo meliputi: *Pertama*, kebijakan afirmatif dengan sistem suara terbanyak karena akan membuat caleg, khususnya caleg perempuan, menjadi lebih dekat dengan masyarakat atau calon pemilih. *Kedua*, figur atau sosok caleg tersebut baik melalui lembaga sosial keagamaan, kekonsistenan, serta bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat. *Ketiga*, kinerja caleg tersebut, khususnya caleg *incumbent*, saat masih menjabat menjadi anggota dewan periode sebelumnya.

Peluang-peluang anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo ini sesuai dengan konsep awal *marketing* politik yang dikemukakan Firmanzah⁸¹, bahwa *marketing* politik adalah konsep permanen yang harus dilakukan terus menerus oleh sebuah partai politik atau kontestan dalam membangun kepercayaan dan *image* publik.

Membangun kepercayaan dan juga *image* ini hanya bisa dilakukan melalui hubungan jangka panjang dan juga tidak *instant* sehingga dengan sendirinya akan memunculkan peluang.

4. Tantangan Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

.

⁸¹ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 156.

Meskipun berhasil lolos pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, namun bukan berarti anggota legislatif terpilih perempuan tidak tertantang oleh banyak hal ketika berkampanye. Tantangan-tantangan tersebut bisa jadi merupakan sebab rendahnya partisipasi perempuan di ranah politik dari periode ke periode. Pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, terdapat lima tantangan utama yang menjadi hambatan bagi ketujuh anggota legislatif terpilih perempuan ketika berkampanye, antara lain, tantangan kultural, tantangan psikologis, tantangan sistem politik, tantangan tradisional, dan tantangan sosio-ekonomi.

a. Tantangan Kultural

Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan memiliki banyak tantangan dalam memasuki dunia politik. Tantangan tersebut menjadikan perempuan memiliki *starting point* berbeda dengan laki-laki dalam berpolitik. Laki-laki memiliki keterlibatan yang lebih besar dan lama di dalam dunia politik karena ia ditempatkan oleh masyarakat untuk berperan di ruang publik, sementara perempuan kepada ruang domestik.

Hal ini sebagaimana dijelaskan:

"Bagi saya pribadi, saya merasakan seperti itu. Sebenarnya kita itu mampu (tetapi) *mindset* dari (masyarakat), kita hanya tinggal mengarahkan kan. Padahal mereka itu yang kadang pesimis."82

"Anggapan di masyarakat kalau politik itu kotor. Kalau orang Sidoarjo itu kan masih pingitan ya mbak – patriarki. Perempuan

⁸² Wawancara dengan Enny Suryani, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 15 Desember 2014.

(apalagi) muslim biasanya dianggap kalau ikut politik itu sudah di luar batas. Sehingga mereka berpikiran udahlah perempuan di dapur aja. Sementara laki-laki di luar."83

"Sempat sih waktu pemilu kemarin diremehkan atau dibandingkan dengan salah satu caleg laki-laki yang satu partai, dan satu kampung. Itu laki-laki, *incumbent*, konkrit, berpengalaman. Apa nanti yang perempuan ini (kinerjanya) juga bisa mengimbangi seperti itu?"⁸⁴

Namun ada perbedaan anggapan dari salah satu anggota legislatif terpilih perempuan, sebagaimana berikut:

"Enggak sih mbak. Ya kalau pengalaman kemarin saya yang kedua gitu ya nggak itu sih mbak, cukup ini tadi ke masyarakat. Mereka sudah tahu program-program (saya)."85

Secara tidak langsung, sebagai caleg *incumbent* Juana Sari ingin menegaskan bahwa beliau sudah menunjukkan program kerja yang baik selama menjadi anggota dewan periode 2009-2014 sehingga beliau tidak menghadapi tantangan secara sosio kultural yang seringkali meremehkan kinerja perempuan di ranah politik.

Namun, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika berkampanye sebagian besar caleg perempuan masih menghadapi tantangan secara sosio kultural berupa adanya rasa pesimis dari masyarakat terhadap keberadaan caleg perempuan, adanya anggapan

⁸⁴ Wawancara dengan Ainun Jariyah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 13 Desember 2014.

⁸³ Wawancara dengan Umi Khaddah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 5 Desember 2014.

⁸⁵ Wawancara dengan Juana Sari, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 18 Desember 2014.

politik itu kotor serta budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, serta adanya keragu-raguan dari masyarakat ketika caleg perempuan dihadapkan dengan caleg laki-laki yang lebih berpengalaman di dunia politik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih berkembangnya ideologi gender yang disosialisasikan oleh budaya, agama, maupun Negara yang menyebabkan adanya marginalisasi, subordinasi dan juga *stereotype* terhadap perempuan yang ingin berkarir di dunia politik.

Di mana hal tersebut akhirnya turut mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

b. Tantangan Psikologis

Perempuan memiliki banyak tantangan untuk beraktivitas di dalam dunia politik. Tantangan tersebut dapat berasal dari masyarakat, keluarga, bahkan dari internal diri perempuan itu sendiri. Tantangan dari internal diri perempuan itu sendiri – atau yang biasa disebut dengan tantangan secara psikologis – merupakan salah satu tantangan yang paling sering dihadapi para caleg ketika terjun secara langsung ke masyarakat dalam pencalonan legislatif.

Berikut pernyataan beberapa anggota legislatif terpilih perempuan terkait tantangan psikologis yang mereka hadapi saat berkampanye:

"Dulu awal-awalnya iya (ada rasa kekhawatiran), tapi karena saya semangat, yakin saya bisa saya mampu akhirnya ya di sini." 86

"Saya (sebenarnya) juga kan minder terus; Tapi (meskipun) dengan keragu-raguan yang besar di hati saya tetep jalan." 87

"Jadi (saat) saya memberikan pengertian seperti itu dilihat dari rumah ke rumah setiap hari pada waktu (berkampanye) saya sampai malem kadang sampai (capek)."88

"Makanya kembali lagi terkait perwakilan perempuan ini maksud saya (agak kurang) karena ada rasa takut untuk bersaing dengan laki-laki."89

Senada dengan keempat anggota legislatif terpilih perempuan di atas, anggota DPC Partai Gerindra Sidoarjo pun turut mengakui bahwa tantangan secara psikologis menjadi tantangan yang paling dominan dihadapi oleh caleg perempuan.

"Masih ada unsur ketakutan caleg perempuan. Merasa kalah sebelum bertanding sehingga membutuhkan pembinaan (yang lebih). (Caleg perempuan) juga (biasanya) tidak mudah mendekatkan diri ke lawan jenis (karena pada dasarnya menyasar ke ibu-ibu)." ⁹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota legislatif terpilih perempuan turut menghadapi tantangan psikologis

⁸⁶ Wawancara dengan Ainun Jariyah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 13 Desember 2014.

⁸⁷ Wawancara dengan Umi Khaddah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 5 Desember 2014.

⁸⁸ Wawancara dengan Sulistyowati Nurul K, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 23 Desember 2014.

⁸⁹ Wawancara dengan Enny Suryani, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 15 Desember 2014.

⁹⁰ Wawancara dengan Sokeh selaku anggota DPC Partai Gerindra Sidoarjo, 4 Desember 2014.

berupa rasa minder, rasa kekhawatiran, rasa lelah, rasa takut untuk bersaing dengan laki-laki serta perasaan kalah sebelum bertanding.

c. Tantangan Sistem Politik

Sebagai sebuah bangsa yang menghargai demokratisasi yang berjalan, keputusan MK yang mengesahkan pemberlakuan sistem politik dengan suara terbanyak dalam pemilu mau tidak mau harus dimaknai sebagai sebuah konsekuensi logis. Sistem suara terbanyak di satu sisi menjadi tantangan bagi perempuan karena pertarungan politik terbuka akan sangat memberatkan bagi posisi perempuan. Namun di sisi lain juga menambahkan semangat baru bagi perempuan karena tidak lagi menjadi get voter di dalam pemilu.

Tetapi, sistem politik yang dibangun oleh pemerintah seringkali memberikan dampak yang berbeda terhadap partisipasi politik antara laki-laki dengan perempuan di lembaga legislatif. Dampak dari sistem politik dengan aturan suara terbanyak mengharuskan para caleg perempuan untuk terjun dan lebih dekat dengan para konstituennya secara langsung. Tetapi tidak hanya konstituen, caleg perempuan juga diharuskan menghadapi lawan politiknya yang juga berada di dapil yang sama guna meraih suara sebanyak-banyaknya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh beberapa anggota legislatif terpilih perempuan.

"Ya saya kan juga orang baru ya, sempat membuat saya waswas juga. Karena trik mereka (lawan politik untuk mendapatkan banyak suara) juga sudah berpengalaman. Mereka itu amat sangat licik dan kotor (dalam hal berkampanye)."⁹¹

"Tantangannya kan dapil yang sama diperebutkan banyak orang. Jadi ya dari kitanya aja pinter-pinter pendekatan. Paling tidak ikatan batin itu jangan dirubah karena jaringan itu perlu sekali." ⁹²

"Banyak sih mbak, seperti *black campaign* itu kan, dari caleg yang lain. Mulai dari isu-isu politik, sampai mulai isu-isu partai ya, sampai ke isu-isu personal. Ya banyak mbak. Mulai dari isu-isu yang katanya kalau kita tuh korupsi, *sing* katanya kita itu – *wes* pokoknya banyak lah. Tapi *alhamdulilah* nggak berpengaruh (terhadap perolehan suara)."93

Berdasarkan pernyataan di atas, secara sistem politik, tantangan yang dihadapi oleh anggota legislatif terpilih perempuan cukup beragam. Mulai dari trik lawan politik yang licik dan kotor, satu daerah pemilihan yang diperebutkan oleh banyak caleg, sampai masalah *black campaign*. Berbagai tantangan secara sistem politik tersebut tentu saja dapat menjadi penghalang besar untuk perempuan untuk terlibat di dalam dunia politik.

d. Tantangan Tradisional

Stereotype atau pelabelan yang melekat pada perempuan dan lakilaki karena konstruksi tradisional, seolah-olah sudah menjadi kodrat di masyarakat. Akibatnya, perempuan akan selalu identik dengan makhluk

⁹¹ Wawancara dengan Sulistyowati Nurul K, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 23 Desember 2014.

⁹² Wawancara dengan Yunik Nur Aini, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 10 Desember 2014

⁹³ Wawancara dengan Juana Sari, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 18 Desember 2014.

yang cantik dan lemah lembut, sedangkan laki-laki akan selalu identik dengan makhluk yang kuat, rasional, jantan, perkasa, sehingga sejak kecil laki-laki terbiasa untuk menjadi kuat. Dalam ranah politik, ketika perempuan ingin mengajukan diri sebagai anggota legislatif, tidak jarang perempuan hanya dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai pelengkap keterwakilan 30% saja.

Akibatnya, banyak cemoohan atau ucapan miring yang ditujukan untuk kaum perempuan, yang berawal dari konstruksi tradisional di masyarakat, sebagaimana dijelaskan:

"(Sempat diragukan) 'Jadi ketua isok jadi ta? kan tantangannya mesti biasa mbak sudah di-enyek orang dimaki orang macemmacem. Terjun ke masyarakat kan yang penting tujuan kita kan baik. Kalau mau dengan saya ya monggo, nggak ya nggak pa-pa, itu haknya kan dan jalannya kan (memang) seperti itu." "94"

Anggota legislatif terpilih perempuan yang lain menyatakan bahwa budaya meminta yang sudah mengakar di masyarakat turut menjadi tantangan tradisional yang dihadapi oleh anggota legislatif terpilih perempuan saat berkampanye sebagaimana berikut:

"Masalahnya masyarakat sekarang itu (suka) meminta mbak. *Nah* masalahnya kalau mereka meminta terus kita nggak ngasih kan mesti nanti di cap nggak enak. Tapi kenyataannya kan ketika meminta kita menjelaskan, kalau kita mampu ya diberi, tetapi kalau nggak mampu ya silahkan (tidak diberi)."

⁹⁴ Wawancara dengan Umi Khaddah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 5 Desember 2014

⁹⁵ Wawancara dengan Juana Sari, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 18 Desember 2014.

Hal ini berbeda dengan pernyataan salah satu anggota legislatif terpilih perempuan yang lain, yang mengaku tidak menghadapi tantangan secara tradisional.

"Saya datangnya itu ke Jamaiyah-Jamaiyah tadi mbak, jadi kan, *nyuwon sewu*, di organisasi, pun ketua itu kan istilahnya itu ya sedikit banyak kan dihargai, jadi ya *ndak* berani lah sungkan istilahnya dia kalau minta (sumbangan maupun buah tangan) seperti itu kan."

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa anggota legislatif terpilih perempuan di atas dapat diketahui bahwa konstruksi tradisional masyarakat seringkali memandang sebelah mata keterwakilan 30% perempuan sehingga banyak ucapan miring yang diterima salah satu anggota legislatif terpilih perempuan saat berkampanye. Selain itu budaya masyarakat yang seringkali meminta buah tangan diakui oleh salah satu anggota legislatif terpilih perempuan turut menjadi tantangan tersendiri saat berkampanye, mengingat tidak semua caleg perempuan memiliki dana yang besar. Tetapi, tidak semua anggota legislatif terpilih perempuan mengalami tantangan secara tradisional saat berkampanye dikarenakan figur beliau di lembaga sosial keagamaan.

Tantangan-tantangan secara tradisional tersebut, sedikit banyak merupakan penyebab sedikitnya anggota legislatif terpilih perempuan yang berhasil lolos ke parlemen.

⁹⁶ Wawancara dengan Ainun Jariyah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 13 Desember 2014.

e. Tantangan Sosio-Ekonomi

Dalam era politik *modern*, uang memainkan peranan utama dalam konstetasi politik. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak hanya membutuhkan *network*, tetapi juga dukungan *financial* yang kuat seperti yang diungkapkan oleh seorang pemimpin politik di California tahun 1960an, Jesse Unruh yang menyatakan jika *'money as the mother's milk of politics'*. Meskipun perempuan merupakan pendatang baru yang memiliki keterbatasan memobilisasi uang, tetapi diakui oleh sebagian besar anggota legislatif terpilih perempuan, mereka tidak memiliki masalah terkait pendanaan saat berkampanye.

"Ndak ada. Karena saya kan sudah terjun lapangan mulai awal saya sempat kerja itu sudah ada di lapangan bukan ibu rumah tangga. Jadi nggak ada kendala (terkait dana)." 98

"Kalau bagi saya perempuan, (tantangan sosio ekonomi) tidak ada karena ada suami yang menopang juga, karena bagaimanapun untuk biaya *banner*, *sticker*, kartu, kita memang kalau sudah niat masuk di situ (dunia politik) kita memang sudah harus menganggarkan keuangan berapa yang harus kita pakai nanti. Jangan sampai ini mempengaruhi anggaran yang ada di rumah tangga kita. (Tantangan) nggak lah semuanya kalau kita bisa mengatur."

⁹⁸ Wawancara dengan Yunik Nur Aini, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 10 Desember 2014.

⁹⁷ Karl-Heinz Nassmacher, Introduction: Political Parties, Funding and Democracy In Funding of Political Parties and Election Campaigns; Handbook Series, (Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2003), 5.

⁹⁹ Wawancara dengan Enny Suryani, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 15 Desember 2014.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikatakan perwakilan sebagian partai pengusung masing-masing anggota legislatif terpilih perempuan, sebagaimana berikut:

"Kalau kemarin aturan nomor itu perempuan-perempuan ini banyak yang ikut (sangat antusias) tetapi begitu aturan suara terbanyak maka perempuan-perempuan ini akan mikir sekian kali lagi dengan keberadaan keuangan. Yang jadi otomatis yang punya uang. Sedangkan perempuan di sini yang dikatakan mampu keuangannya ya itu saja (Ainun Jariyah) sehingga yang jadi itu." 100

"Sebenarnya tantangannya hanya satu. Caleg perempuan itu banyak yang tidak punya duit. Kalau partai (sendiri) nggak ada tantangan." 101

Berdasarkan pernyataan di atas, nampak jelas bahwa sebagian besar anggota legislatif terpilih perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki masalah terkait pendanaan ketika berkampanye. Mereka telah memiliki dukungan *financial* yang kuat, baik dari pribadi ataupun di*support* oleh suami. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, selain strategi pemenangan yang baik, faktor keuangan juga turut ambil andil dalam pemenangan suatu pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, tantangan- tantangan yang dihadapi oleh anggota legisltif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, dapat digambarkan dalam tabel 4.4 berikut ini:

Wawancara dengan Margono, selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo, 17 Desember 2014.

Wawancara dengan Sumaiyah, selaku Wakil Bendahara DPC PKB Sidoarjo, 12 Desember 2014

Tabel 4.4

Tantangan-Tantangan yang dihadapi oleh Anggota Legislatif
Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten
Sidoarjo

No.	Tantangan- Tantangan	Berupa
1.		Stereotype di masyarakat bahwa politik itu kotor.
		Adanya budaya patriarki di masyarakat yang menempatkan
		perempuan pada ruang domestik dan laki-laki pada ruang publik.
		 Keragu-raguan masyarakat terutama ketika caleg perempuan dihadapkan dengan caleg laki-laki yang lebih berpengalaman di dunia politik.
2.	Tantangan P <mark>si</mark> kologis	 Adanya perasaan minder, kekhawatiran, rasa lelah, rasa takut untuk bersaing dengan laki-laki serta perasaan kalah sebelum bertanding.
3.	Tantangan Sistem Politik	 Trik lawan politik yang licik dan kotor guna meraih sebanyak- banyaknya suara. Satu dapil yang diperebutkan
		oleh banyak caleg. • Black campaign.
4.	Tantangan Tradisional	 Ucapan miring dari masyarakat. Dianggap hanya sebagai pelengkap keterwakilan 30% perempuan saja. Kebiasaan meminta buah tangan dan sumbangan dari para caleg di masyarakat.
5.	Tantangan Ekonomi	Tidak banyak caleg perempuan yang memiliki dana yang besar.

Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan yang dihadapi oleh anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo meliputi: Pertama, tantangan secara kultural di mana adanya stereotype yang berkembang di masyarakat bahwa politik itu kotor, adanya budaya patriarki di masyarakat yang menempatkan perempuan pada ruang domestik dan laki-laki pada ruang publik serta adanya keragu-raguan dari masyarakat terutama ketika caleg perempuan dihadapkan dengan caleg laki-laki yang lebih berpengalaman di dunia politik. Kedua, tantangan secara psikologis di mana ada perasaan minder, kekhawatiran, rasa lelah, rasa takut untuk bersaing dengan laki-laki serta perasaan kalah sebelum bertanding. Ketiga, tantangan secara sistem politik di mana banyak trik lawan politik yang licik dan kotor guna meraih sebanyak-banyaknya suara sampai kepada masalah black campaign. Keempat, tantangan secara tradisional di mana banyak ucapan miring dari masyarakat serta anggapan bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap keterwakilan 30% saja dan mengakarnya kebiasaan meminta buah tangan atau sumbangan dari para caleg di masyarakat. Kelima, tantangan secara sosio ekonomi, di mana tidak banyak caleg perempuan yang memiliki dana yang besar untuk berkampanye.

Tantangan-tantangan ini kerap kali terjadi karena urgensi akan keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia banyak sekali terkendala oleh banyak faktor.

Selain tantangan-tantangan di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.

Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu lakilaki. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin lakilaki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender sehingga perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki.

Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen dan keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan juga partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

a. Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

Strategi pemenangan berperan penting dalam kesuksesan suatu pemilu. Karena kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian tantangan-tantangan yang membatasi kemajuan mereka, maka dari itu strategi harus dipelajari secara simultan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam konteks manajemen, strategi dikenal dengan istilah *manajement-strategic*. Selain itu, telah diadopsi pula prinsip-prinsip manajemen pemasaran yang dalam implementasinya digunakan oleh organisasi partai politik, terutama dalam kerangka berpikir strategi pemenangan. Pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, terdapat tiga strategi utama yang digunakan untuk menggarap segmen-segmen pasar yang telah dilakukan oleh anggota legislatif terpilih perempuan, antara lain, strategi pemasaran serba-sama, strategi pemasaran serba-aneka, dan strategi pemasaran terpusat.

1. Strategi Pemasaran Serba-Sama

Strategi pemasaran serba-sama, yaitu strategi yang diterapkan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan setiap segmen baik secara geografik, demografik, psikografis, maupun perilaku. Strategi ini bertujuan untuk meraih pemilih sebanyak mungkin. Dengan cara

merancang suatu program pemasaran guna membidik sebagian besar pemilih. Strategi pemasaran serba-sama ini lah yang dilakukan oleh sebagian anggota legislatif terpilih perempuan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Umi Khaddah yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini sebagaimana berikut:

"Merangkul masyarakat, bagaimana caranya kita terjun di masyarakat, tidak membedakan (calon pemilih) laki atau perempuan, tidak membedakan agama harus islam atau tidak, kan tidak tahu kan. Tidak harus lewat Jamaiyah, lewat apa gitu kan tidak harus begitu mbak. Yang penting suara itu di manamana, yang penting kita bisa lanjut ke (legislatif), partai juga sama kayak gitu."102

Meskipun PPP merupakan partai yang berideologi Islam, dan bahkan memproklamirkan diri sebagai "Rumah Besar Umat Islam", namun berdasarkan pernyataan Ketua DPC PPP Sidoarjo yang kini menjadi anggota legislatif terpilih perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo ini menegaskan bahwa dirinya tidak membedakan pemilih berdasarkan jenis kelamin maupun agama karena bagi beliau, suara ada di mana saja dan yang paling penting beliau dapat lolos ke legislatif.

Adapun bentuk operasional dari strategi pemasaran serba-sama yang dilakukan oleh Umi Khaddah, yaitu:

¹⁰² Wawancara dengan Umi Khaddah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 5 Desember 2014.

"Istilahnya meskipun kontribusi saya nggak banyak yang penting orang itu kalau (caleg) perempuan itu kan *ndak mbujuk'i* itu loh mbak. Setelah saya jadi kan saya datang lagi, ucapan, nggak harus kita kasih apa-apa kan gitu, ya strateginya itu. Nggak harus dari Jamaiyah, PKK, semuanya kan kita datangi." ¹⁰³

Lantas, beliau melanjutkan:

"Mendekati kyai iya (juga) untuk meminta restu." ¹⁰⁴

Saat disinggung masalah pemberian sumbangan kepada calon pemilih atau konstituen, Umi Khaddah membantah dengan mengatakan:

"Saya nggak sumbangan-sumbangan. Saya datang mohon doa restu. Kalau memang saya tuh di-ridhoi (oleh) Allah dan (juga) di-ridhoi panjenengan untuk menjadi wakil panjenengan ya insya allah kita nanti berjuang bersama-sama." ¹⁰⁵

Lantas beliau menambahkan:

"Mungkin (karena) perempuan juga *luwes* penyampaiannya dan orang-orang itu juga nggak minder. Saya dulu (saat menjabat sebagai kepala desa) kalau ada (orang) ngurus-ngurus KK apa gitu-gitu biasanya sering didekati, terus kalau diperintah nggak pakai begini-begini (uang), ngurus sertifikat, ngurus kayak akta kelahiran apa itu kan kelihatan sih jadi orang tahu. Pemilihan kepala desa beberapa kali ya kepilih lagi itu kan *insya allah* nggak masalah kalau pemilihan-pemilihan. Kalau (caleg) bapak-bapak kan memang wataknya gini, gini, gini (uang). Contoh kepala desa. *Wes* nggak pakai gini-gini (uang) kalau

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁵ *Ibid.*,

orang itu percaya dan yakin *insya allah* sampai dipengaruhi orang (untuk memilih caleg lain) kan nggak ikut. Orang itu dipercaya kan, *wes pokok'e* harus yakin *wes*, dulu saya juga gitu."¹⁰⁶

Adapun terkait pengaruh konflik internal yang sedang terjadi dalam tubuh PPP pada hasil perolehan suara, Umi Khaddah menjelaskan:

"Kalau saya pribadi tidak (berpengaruh). Itu tergantung calegnya. Kalau kita pintar ngomong, itu sudah biasa, di dalam partai politik ada konflik internal." 107

Adapun terkait isu perempuan/gender yang diusungnya saat berkampanye, Umi Khaddah menambahkan:

"Pada waktu itu ya tetep saya sampaikan. Isu gender ya saya lakukan. Cuma ya nggak gencar." 108

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa turba (turun langsung ke bawah) dengan tidak hanya mendatangi acara pengajian, PKK, tetapi juga semua acara di masyarakat, kampanye diskusi kelompok dengan mendekati tokoh agama dan tokoh masyarakat, mengusung isu perempuan/gender, mensosialisasikan citra partai dan citra caleg serta ditunjang oleh *background* beliau yang anti politik uang selama menjabat menjadi kepala desa 3

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ *Ibid*.,

¹⁰⁸ *Ibid.*,

periode di Sukodono menjadi kunci pemenangan Umi Khaddah pada pemilu legislatif kali ini.

Selain Umi Khaddah, Yunik Nur Aini, anggota legislatif terpilih perempuan dari Partai Gerindra, juga turut menggunakan strategi pemasaran serba-sama saat pemilu legislatif dengan bentuk operasional yang kurang lebih sama, berikut pernyataannya:

"Jadi satu, karena untuk sosialisasi pencalegan agak ribet ya (kalau berkampanye berdasarkan klasifikasi khusus), jadi nggak ada bedanya." ¹⁰⁹

Adapun bentuk operasionalnya, Yunik Nur Aini mengatakan:

"Ya, betul (memakai sumbangan). Tapi itu pun mbak, walau saya belum nyaleg kalau ada orang yang membutuhkan kalau saya mampu ya *tak* kasih. Jadi nggak hanya pas pemilu aja kan gitu." ¹¹⁰

Beliau lantas menambahkan:

"Citra partai juga berpengaruh. Soalnya ini kadang orang itu lihat *background* orangnya juga, kadang lihat partainya. *Background*-nya (antara partai dan caleg) saling keterkaitan."¹¹¹

Adapun lama masa kampanye yang dilakukan, Yunik Nur Aini menuturkan:

¹⁰⁹ Wawancara dengan Yunik Nur Aini, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 10 Desember 2014.

¹¹⁰ Ibid.,

¹¹¹ *Ibid.*,

"Saya kampanye 5 bulan dari November 2013 sampai Maret 2014." ¹¹²

Adapun terkait kampanye diskusi kelompok dengan cara mendekati tokoh agama atau tokoh masyarakat, Yunik Nur Aini menegaskan bahwa beliau tidak hanya mendekati tokoh agama atau tokoh masyarakat saja, berikut pernyataannya:

"Macem-macem mbak. Pemilih kan bukan dari tokoh agama aja. Masyarakat kecil ada, ya pekerja kasar, terus ya tokoh (masyarakat), ya semuanya." 113

Lantas beliau menambahkan bahwa mendekati tokoh agama atau tokoh masyarakat tidak terlalu berpengaruh pada hasil perolehan suara, berikut pernyataannya:

"Nggak juga karena masyarakat sekarang kan sudah pinter jadi semua itu lihat *background* sama partai." 114

Hal ini disetujui oleh anggota DPC Partai Gerindra Sidoarjo –
partai yang mengusung Yunik Nur Aini pada pemilu legislatif 2014
– yang menyatakan:

"Kenapa Ibu Yunik bisa kepilih? Karena pertama, secara penampilan dia cantik. Lalu dia juga nomor urutnya nomor tiga. Dia juga anaknya tokoh masyarakat di Waru (dapil Yunik Nur

¹¹² *Ibid.*,

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ *Ibid*..

Aini). Jadi bapaknya sejak dulu sudah loyal sama masyarakat yang ada di sana."¹¹⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua anggota legislatif terpilih perempuan di atas menggunakan strategi pemasaran serba-sama dengan bentuk operasional yang tidak jauh berbeda. Seperti Umi Khaddah yang memilih mendatangi semua acara yang ada di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk Jamaiyah maupun PKK, tetapi semuanya. Umi Khaddah juga mengakui bila beliau juga mendekati tokoh agama di desanya tetapi hanya untuk meminta restu. Saat disinggung mengenai pemberian sumbangan beliau menegaskan bahwa tidak ada sumbangan apa pun yang beliau berikan pada masyarakat saat berkampanye. Hal ini karena saat masih menjabat sebagai Kepala Desa di Sukodono selama tiga periode, beliau tidak pernah menarik uang ke masyarakat saat hendak mengurus KK, sertifikat, akta kelahiran, maupun surat-surat penting yang lain, sehingga Umi Khaddah telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena sikapnya yang cenderung menghindari money politik atau politik uang meskipun beliau tidak memberi sumbangan dalam bentuk apa pun.

Adapun terkait konflik internal yang tengah dialami partai pengusungnya, yakni PPP, Umi Khaddah menegaskan bahwa pengaruh tidaknya pada perolehan suara itu semua tergantung dari

¹¹⁵ Wawancara dengan Sokeh selaku anggota DPC Partai Gerindra Sidoarjo, 4 Desember 2014.

calegnya. Apabila caleg tersebut mampu menjelaskan pada masyarakat, maka masyarakat akan memahami bahwa konflik internal di dalam tubuh partai adalah hal yang biasa. Umi Khaddah juga turut mengusung isu perempuan/gender, meskipun tidak gencar.

Bentuk operasional yang kurang lebih sama turut dilakukan oleh Yunik Nur Aini pada pemilu legislatif tahun ini. Kepraktisan menjadi alasan khusus mengapa beliau memilih strategi pemasaran serba-sama, dibandingkan strategi pemasaran serba-aneka maupun strategi pemasaran terpusat. Adapun terkait bentuk operasionalnya, Yunik Nur Aini melakukan turba (turun langsung ke bawah) dengan mendekati seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tokoh agama maupun tokoh masyarakat saja, tetapi juga masyarakat kecil dan juga pekerja kasar, serta memberikan sumbangan. Namun Yunik Nur Aini menjelaskan bahwa ia memang sudah terbiasa memberi sumbangan secara konsisten kepada masyarakat yang tidak mampu yang dilakukan tidak hanya di saat pemilu. Yunik Nur Aini lantas menambahkan bahwa citra partai Gerindra yang telah mengusungnya pada pemilu 2014 kali ini, juga cukup berpengaruh terhadap perolehan suara yang ia dapatkan, asal harus ditunjang pula dengan backgorund dari caleg tersebut.

Adapun terkait *background* beliau, anggota DPC Partai Gerindra Sidoarjo menjelaskan bahwa Yunik Nur Aini adalah anak tokoh masyarakat di desanya, Waru. Kedua orang tuanya sejak dulu sudah

loyal kepada masyarakat. *Background* yang baik, ditunjang penampilan yang cantik, serta nomor urut yang besar menjadi salah satu kunci keberhasilan Yunik Nur Aini sehingga mampu mengumpulkan 9.351 suara pada pemilu legislatif 2014 kemarin.

Meskipun dilakukan dengan bentuk operasional yang masih konvensional, tetapi dengan strategi pemasaran serba-sama, masyarakat tidak akan merasa di'sisihkan' dengan cara berkampanye yang berbeda yang dilakukan oleh masing-masing caleg karena strategi pemasaran serba-sama memakai teknik atau cara berkampanye yang sama tanpa membedakan adanya perbedaan segmentasi baik secara geografik, demografik, psikografis maupun segmentasi perilaku di masyarakat.

2. Strategi Pemasaran Serba-Aneka

Apabila strategi pemasaran serba-sama mengabaikan perbedaanperbedaan setiap segmen yang ada, maka lain halnya dengan strategi
pemasaran serba-aneka. Strategi pemasaran serba-aneka, yaitu
merancang beberapa program pemasaran untuk segmen-segmen
yang berbeda. Dengan cara ini diharapkan suatu partai peserta
pemilu memiliki posisi yang kuat di setiap segmen. Strategi ini
efektif jika program-program itu diikat benang-merah yang
membentuk persepsi bahwa secara umum partai menawarkan
program besar yang sama dan konsisten pada setiap segmen

meskipun dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Strategi pemasaran serba-aneka inilah yang diterapkan oleh salah satu anggota legislatif terpilih perempuan, berikut pernyataannya.

"Kalau (untuk) masyarakat menengah ke atas, kebetulan saya punya klinik (di Porong), saya disitu mendirikan senam Lansia khusus untuk mereka yang kelas menengah ke atas. Itu semua pegawai, atau semua pemegang kartu nasional dari kepolisian, pokoknya semua tafsiran, baik itu ABRI maupun PNS, guru juga. Nah itu saya tampung disitu saya ajak. Dan disitu saya (mengadakan) kegiatan yang lain dari yang lain. Pada saat senam itu saya sediakan dokter. Dokter giginya saya, dokter umumnya ada dokter saya penanggung jawab, saya panggil, kita habis melakukan senam kita adakan ceramah tentang penyakit tergantung permintaan mereka minta apa. Semua penyakit apa, 'jantung bu', misalnya, 'ini bu asam urat bu', bulan depan apa bulan berikutnya apa itu yang membuat mereka tertarik dan itu pemeriksaannya gratis." 116

Selanjutnya, beliau menambahkan:

"(Untuk masyarakat) yang (menengah) ke bawah saya turun di sana waktu itu mengadakan kayak semacam kegiatan jalan santai atau apa tapi saya beri *doorprize* yang membuat mereka tertarik juga. (Sementara untuk) pemilih pemula itu saya sentuh waktu itu saya ke sekolah kita adakan *fogging* di sekolahnya – saya semprot sekolahnya supaya tidak ada nyamuk, saya lihat, masalah kebersihan lingkungan terutama soal sampahnya bagaimana mereka harus *care* terhadap sampah karena itu membawa dampak yang tidak ringan nantinya. Mereka itu kan pendidikannya lebih tinggi dan dia akan mikir nantinya, siapa yang mau dia pilih, jadi saya hanya mendidik." ¹¹⁷

.

Wawancara dengan Sulistyowati Nurul K, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 23 Desember 2014.

¹¹⁷ *Ibid.*,

Adapun untuk memaksimalkan strategi pemasaran serba-aneka, Sulistyowati juga turut melakukan kampanye dari pintu ke pintu sebagaimana pernyataan berikut:

"Iya kan jadi saya jalan sendiri turun. Saya *door to door* justru – dari pintu ke pintu – dari rumah ke rumah. Contohnya saya kan di sana kan membuat tim, jadi di setiap desa saya punya tim, kordes, kalau di desa tuh namanya kordes – koordinator desa, kordes punya (tim) per-TPS. Pada suatu saat TPS disana ada koordinatornya. Itu saya kunjungi secara bergiliran, periodik saya kunjungi satu per satu selama 1 tahun lebih. 1 tahun lebih saya turun langsung ke desa, saya tidak mau (hanya) membayar tim, saya tidak mau percaya atau pasrah pada tim tapi saya turun sendiri didampingi suami saya, bahkan sama anak-anak saya."

Selain kampanye dari pintu ke pintu, Sulistyowati juga melakukan kampanye diskusi kelompok dengan mendekati tokoh masyarakat di daerah pemilihannya, sebagaimana yang dijelaskan:

"Setiap kepala desa apa kecamatan saya *silaturahmi*. Kepala desa saya *silaturahmi*. Ketua tokoh-tokoh saya cari. Jelas (Pengaruhnya). Kalau misalkan tokoh masyarakat itu kan mereka punya biasanya di suatu desa itu (dilihat) tokohnya itu cenderung ke mana, nah itu yang dia (masyarakat) ikuti." 119

Adapun terkait kampanye melalui pengajian, Sulistyowati menegaskan bahwa beliau tidak mau mencampur-adukkan urusan agama dengan politik, berikut pernyataannya:

.

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ *Ibid.*,

"Mohon maaf kalau di dalam pengajian saya tidak mencampur-adukkan antara kepentingan politik dengan kepentingan agama." ¹²⁰

Terkait pengaruh citra Partai Golkar terhadap hasil perolehan suara di daerah pemilihannya, khususnya Porong, Sulistyowati menjelaskan:

"Kalau kita misalkan di daerah ya itu dapil ya orang-orang terutama masyarakat, itu yang dipilih itu sosoknya bukan partai. Partai hanya kendaraan (politik) saja. Ibaratnya ya gitu ya." 121

Saat disinggung mengenai isu perempuan/gender, Sulistyowati menyatakan ketidaksetujuannya sebagaimana berikut:

"Saya sebenarnya kalau masalah gender saya tidak setuju. Kalau laki-laki dengan wanita harus sejajar itu saya tidak setuju. Agama tidak mengajari seperti itu, tetapi kalau secara wajar, oke." 122

Selain melakukan berbagai macam strategi pemenangan di atas, Sulistyowati juga tidak lupa mensosialisasikan cara pencoblosan pada masyarakat untuk memaksimalkan strategi pemenangan serta kampanye yang beliau lakukan, sebagaimana pernyataan berikut:

"Betul. Waktu itu ya sambil *campaign* juga sudah saya bekali dengan alat. Saya bikin cetakan sendiri, kasih contoh, cetakan tahun kemarin gitu ya, saya buat contoh, nantinya tuh

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ *Ibid.*,

¹²² *Ibid.*.

sudah (saat bertanya) 'Ibu sudah tahu nggak caranya nyoblos?', saya bagikan ke tim saya nanti saya turun, saya kroscek ke bawah, paham nggak tentang pencoblosan. Kan sulit kemarin itu. Buanyak dan caranya juga membingungkan. Nah itu kebetulan partai saya nomor lima, nomor saya juga lima. Jadi kelebihan apa memberikan pengertian ke mereka itu adalah (menjadi) lebih mudah. "123

Adapun terkait mobilisasi dana kampanye, Sulistyowati menambahkan:

"Ya dengan sendiri kan butuh *transport*, ya kan, dan balihobaliho itu mahal. Kalau jumlahnya saya *ndak* hafal ya karena ada bendera, ada baliho, ada spanduk, ada penutup warung, saya bagikan ke (masyarakat). Tulis warung apa, tapi ada foto saya." ¹²⁴

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran serba-aneka, kampanye dari pintu ke pintu, kampanye diskusi kelompok, mensosialisasikan citra partai dan citra caleg, sosialisasi cara pencoblosan, serta mobilisasi dana kampanye merupakan kunci keberhasilan Sulistyowati pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo meskipun latar belakang beliau bukan dari politik, melainkan kedokteran.

Strategi yang serupa juga dilakukan oleh anggota legislatif terpilih perempuan yang lain, berikut pernyataannya.

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ Ibid.,

"Ketika kita memaparkan program-program kita tentunya harus lihat (dulu) kan mbak. 'Oh ibu-ibu sukanya apa'? Sukanya masak (misalnya). Ayo kita bikin pelatihan masak (atau) sukanya pengen punya keterampilan. Kadang-kadang kan ada ibu rumah tangga, kalau pengen punya kreasi yang bisa meningkatkan atau membantu pekerjaan suami nanti saya bikinkan pelatihan, misalnya, dikreasikan, dikembangkan gitugitu aja. Tergantung kalau sama anak-anak kan nggak boleh kan. Kalau sama mahasiswa kita sharing ilmu jadi pengalaman kita di dewan bagaimana, sama aktivis-aktivis itu ya, ya itu tadi ilmu aja." 125

Apabila Sulistyowati melakukan kampanye dari pintu ke pintu dan kampanye diskusi kelompok saat pemilu, maka lain halnya dengan Juana Sari yang melakukan kampanye massa tidak langsung, sebagaimana dinyatakan:

"Hanya koran aja. Macem-macem. Kadang Jawa Pos, kadang Radar, kadang macem-macem – Tempo." 126

Lantas beliau menambahkan:

"Untuk mencari suara itu juga bisa dengan pengajian, bisa dengan apa pun lah ya intinya." ¹²⁷

Namun, ketika ditanya terkait masalah sumbangan, Juana Sari membantah dengan mengatakan:

"Kalau dulu pertama (nyaleg) saya diuntungkan sama (sosok) Pak SBY ya jadi niatnya cepet. Juga nggak ada money

¹²⁵ Wawancara dengan Juana Sari, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 18 Desember 2014.

¹²⁶ Ibid.,

¹²⁷ Ibid..

politik – kalau dulu. Tetapi ketika sekarang, kan ketika 5 tahun ini kan kita menjalin *silaturahmi* ke konstituen (lewat pengajian-pengajian) itu terus sering menyapa, jadi waktu mencalonkan lagi sudah nggak perlu *ngoyo-ngoyo* ngasih ini ngasih itu enggak – jadi mereka sudah tahu."¹²⁸

Saat disinggung mengenai citra Partai Demokrat yang sudah dua kali mengusungnya, Juana Sari menjelaskan:

"Kalau citra partai sih memang sangat pengaruh. Tapi ditunjang juga sama personal. Jadi ya pengaruh juga." ¹²⁹

Adapun terkait mengusung isu perempuan/gender, Juana Sari menambahkan:

"Enggak, Karena pemilihnya sama antara perempuan dan laki-laki. Jadi kita mengusung isu gender (hanya) ketika kita bertemu dengan konstituen yang perempuan, kalau dengan laki-laki (tidak)." ¹³⁰

Selain itu, beliau juga turut melakukan sosialisasi cara pencoblosan pada masyarakat atau calon konstituen, berikut pernyataannya:

"Ya sama sih mbak karena kan sistemnya sekarang kan suara terbanyak. Nah sedangkan gambar (foto) kita kan nggak ada. Jadi masyarakat perlu tahu cara mencoblos yang benar itu gimana." ¹³¹

_

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ *Ibid*.,

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ *Ibid.*,

Adapun lama masa kampanye yang dilakukan, Juana Sari menambahkan:

"Kalau saya sih mulai awal jadi ya mbak (pertama kali terpilih menjadi anggota dewan tahun 2009) langsung sampai mencalonkan lagi. Jadi modelnya bukan kampanye. Jadi nanti begitu jadi, selama apa, kita selalu mengadakan perkumpulan, terus misalnya pelatihan atau membantu kayak dulu saya pernah bikin sekolah untuk yang masih buta aksara – untuk anak-anak yang masih kelas 3 tapi nggak bisa baca karena orang tuanya nggak mampu menyekolahkan TK – ya hanya kegiatan-kegiatan sosial gitu aja."132

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua anggota legislatif terpilih perempuan di atas menyesuaikan teknik berkampanye yang digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing. Seperti Sulistyowati yang memiliki background kedokteran, beliau melakukan senam lansia sekaligus konsultasi kesehatan gratis untuk masyarakat menengah ke atas, melakukan jalan santai dengan diberi hadiah berupa doorprize untuk masyarakat menengah ke bawah, serta melakukan *fogging* atau pembasmian nyamuk untuk pemilih pemula. Adapun bentuk operasional dari strategi serba-aneka yang sudah Sulistyowati lakukan adalah kampanye dari pintu ke pintu yang dilakukan periodik secara bergiliran selama satu tahun, kampanye diskusi kelompok dengan mendekati tokoh-tokoh masyarakat di daerah pemilihannya, mensosialisasikan citra partai dan citra caleg,

¹³² *Ibid.*,

sosialisasi cara pencoblosan pada masyarakat, serta mobilisasi dana kampanye.

Dengan strategi yang sama namun dengan teknik yang berbeda, Juana Sari juga turut melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk calon konstituen yang ditargetkan.

Untuk kalangan ibu-ibu beliau lebih menekankan pada pelatihan-pelatihan. Sementara untuk mahasiswa, beliau melakukan pendekatan dengan *sharing* atau berbagi ilmu mengenai pengalaman beliau selama menjabat menjadi anggota dewan periode 2009-2014 di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Adapun bentuk operasionalnya, Juana Sari lebih memilih melakukan kampanye massa tidak langsung melalui media cetak, baik Jawa Pos, Radar, maupun majalah Tempo, turba (turun langsung ke bawah) melalui pengajian-pengajian, mensosialisasikan citra partai dan juga citra caleg, mengusung isu perempuan/gender, dan juga melakukan sosialisasi cara pencoblosan.

Strategi berkampanye dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu ini terbukti efektif menarik minat masyarakat berdasarkan segmentasi-segmentasi tertentu dengan berhasilnya kedua anggota legislatif terpilih perempuan ini duduk di parlemen.

3. Strategi Pemasaran Terpusat

Strategi pemasaran terpusat merupakan strategi yang digunakan untuk membidik satu pasar atau beberapa segmen pasar. Prinsipnya, lebih baik merangkul bagian pasar yang luas dari satu atau sejumlah segmen dari pada memperoleh pasar yang sedikit dari segmen pasar yang luas. Ketimbang memilih strategi pemasaran serba-sama maupun strategi pemasaran serba-aneka, anggota legislatif terpilih perempuan berikut ini lebih memilih strategi pemasaran terpusat sebagai strategi utama yang beliau lakukan saat berkampanye, berikut pernyataannya:

"Kalau saya punya tim di daerah Sukodono. Sukodono kita nanti saya nggak keseluruhan kok (kampanye) di desa yang ada di Sukodono. Saya nggak semuanya saya turun, hanya di beberapa titik aja difokuskan di situ mana yang kemarin itu (saat pemilu legislatif 2009) suara saya banyak itu aja. (Kalau di tempat yang saat pemilu legislatif 2009 suaranya kurang) *ndak* karena saya lihat di situ (respon) orang-orangnya kurang (antusias). Kalau *toh* itu tadi ada tim (saya) yang di situ, paling suruh galang (suara) untuk keluarga gitu aja." 133

Adapun terkait bentuk operasional dari strategi pemasaran terpusat yang dilakukan, Enny Suryani menunjangnya dengan melakukan kampanye massa tidak langsung dengan sarana promosi yang lebih sederhana, yaitu memasang *banner* di titik-titik tertentu di daerah pemilihannya, berikut pernyataannya:

_

¹³³ Wawancara dengan Enny Suryani, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 15 Desember 2014.

"Kalau kampanye kemarin *ndak* (terlalu lama). Karena waktunya juga kan aturannya kan juga ketat juga. Kita pasang *banner* kan kalau bukan tempatnya kan juga tidak boleh sehingga saya sudah di titik (Sukodono) itu aja lah." ¹³⁴

Selain kampanye massa tidak langsung melalui pemasangan banner di titik-titik tertentu, Enny Suryani juga melakukan kampanye massa tidak langsung melalui radio, sebagaimana dijelaskan:

"Kalau kemarin sih ada radio lokal, karena mereka buat saya kampanye disitu ya (berkampanye di radio tersebut). Tapi bagi mereka (calon pemilih) katanya juga (efektif). Radio lokal (di Sukodono)"¹³⁵

Selain itu Enny Suryani juga melakukan kampanye massa langsung, berikut pernyataannya:

"Kalau acara Demokrat kemarin kita kan ada konsolidasi di GOR pada saat itu ada Pak SBY, saya bersama dengan konstituen pendukung saya ya itu mengikuti pawai itu; Perjalanan sini (Sukodono) sampai di GOR." ¹³⁶

Adapun terkait kampanye diskusi kelompok dengan metode mendekati tokoh agama maupun tokoh masyarakat di daerah pemilihannya, Enny Suryani mengatakan:

¹³⁴ Ibid.,

¹³⁵ Ibid.,

¹³⁶ Ibid..

"Nggak, nggak terlalu banyak (mendekati tokoh agama maupun tokoh masyarakat di lingkungan Sukodono), karena apa, pengalaman saya kemarin (pemilu legislatif 2009) kalau saya memakai kumpulan atau organisasi ternyata mereka juga meleset – mereka juga pinter ngelirik mana yang duitnya banyak." ¹³⁷

Begitu pula terkait pemberian sumbangan kepada calon pemilih atau konstituen, Enny Suryani membantahnya dengan mengatakan:

"Ya kalau sumbangan sih nggak – hanya sosialisasi (saja)."¹³⁸

Ketimbang memberi sumbangan, Enny Suryani lebih memilih untuk mengusung isu perempuan/gender dalam kampanye yang beliau lakukan, sebagaimana diterangkan:

"Iya, betul perempuan itu memang harus kita doktrin betul bahwa kita harus bekerja itu ada manfaatnya walaupun kita nggak harus bekerja di luar ya, katakanlah sebagai ibu rumah tangga, kan ada waktu waktu yang bisa kita manfaatkan ya." ¹³⁹

Adapun terkait kampanye melalui LPMK, kerja bakti, pengajian, PKK, maupun *event* yang ada di masyarakat, Enny Suryani mengatakan:

"Ya ada yang seperti itu. Menjelaskan karena mereka (pihak yang mengadakan LPMK, kerja bakti, pengajian, PKK, maupun event yang ada di masyarakat) juga minta saya hadir. Tapi

¹³⁷ Ibid.,

¹³⁸ Ibid.,

¹³⁹ Ibid.,

karena selama ini saya sendiri kalau ada reses semuanya kan sering saya undang sehingga mereka-mereka ini masih ada keterikatan ya, makanya kemarin itu kalau saya nggak maju, mereka masih mengharapkan saya maju."¹⁴⁰

Terkait citra partai Demokrat yang mengusungnya pada pemilu tahun ini, Enny Suryani mengakui bila hal itu tidak berpengaruh pada perolehan suara beliau di pemilu legislatif ini, berikut pernyataannya:

"Masing-masing caleg ya – kalau saya ya. Makanya pada saat itu kan (masyarakat bertanya) 'Ibu Enny kok ada di Demokrat' (sebelumnya di PKNU)? 'Demokrat kan sudah hancur' – kan seperti itu. Sudahlah. Kan bukan partai yang maju, tapi kan person-nya, siapa ini ini. Kalau sampean yang merasakan selama ini bagaimana kinerja Enny (selama menjabat menjadi anggota DPRD periode 2009-2014 dari PKNU), monggo, kalau kinerja Enny kurang baik selama ini ya jangan milih saya, kembali lagi. Jadi partai nggak terlalu (berpengaruh) bagi saya sih." 141

Setelah melakukan strategi pemasaran terpusat dengan bentuk operasional kampanye massa tidak langsung baik melalui *banner* dan radio, kampanye massa langsung dengan mengikuti pawai Partai Demokrat di GOR bersama massa pendukungnya, kampanye diskusi kelompok dengan mendekati tokoh agama atau tokoh masyarakat, mengusung isu perempuan/gender, mensosialisasikan citra partai dan citra caleg, serta melakukan turba (turun langsung ke bawah), Enny Suryani melengkapinya dengan melakukan sosialisasi cara

¹⁴⁰ Ibid.,

¹⁴¹ Ibid.,

pencoblosan. Hal ini agar calon konstituen tidak salah memilih nomor urut beliau, mengingat nomor urut beliau adalah nomor urut tujuh atau nomor urut besar. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan:

"Dari pemahaman masyarakat sendiri kurang karena mereka antara yang dicoblos partai dengan orangnya ini ya karena mereka kurang memahami di situ. Memang ini harus banyak kita sosialisasikan terus (cara pencoblosan). Apalagi nomor urut saya ada di nomor urut tujuh (nomor urut besar) ya." 142

Adapun terkait lama masa kampanye yang dilakukan, Enny Suryani menuturkan:

"Waktu yang saya lakukan kalau untuk kampanye itu kurang lebih (satu bulan) karena saya anggap selama ini saya sudah melakukan bertemu dengan masyarakat sudah ikatan emosional (jadi) nggak terlalu berat (saat berkampanye, meskipun hanya dengan waktu yang sebentar)." 143

Terkait mobilisasi dana kampanye, Enny Suryani mengakui hanya menggunakannya untuk *sticker*, *banner*, dan kartu, berikut penjelasannya:

"Iya *banner* sama *sticker* – iya pakai *sticker* sama kartu itu aja." ¹⁴⁴

Selain Enny Suryani, Ainun Jariyah juga merupakan salah satu anggota legislatif terpilih perempuan yang lebih memilih

¹⁴² Ibid.,

¹⁴³ Ibid.,

¹⁴⁴ Ibid..

menggunakan strategi pemasaran terpusat sebagai strategi utamanya. Namun, apabila Enny Suryani melakukan strategi pemasaran terpusat berdasarkan segmentasi geografis, maka lain halnya dengan Ainun Jariyah yang lebih memilih melakukan strategi pemasaran terpusat berdasarkan segmentasi psikografis. Berikut pernyataannya:

"Sederhana saja mbak. Ya saya merangkul ke kelas paling bawah. Kalau ke kelas (menengah) atas tidak." ¹⁴⁵

Terkait bentuk operasionalnya, Ainun Jariyah menjelaskan bahwa beliau melakukan turba (turun langsung ke bawah) secara konsisten, sebagaimana dijelaskan:

"Hu'um, (terjun langsung ke masyarakat melalui LPMK, kerja bakti, pengajian, PKK, ataupun *event* yang ada di masyarakat) sampai sekarang pun saya tiap satu bulan, tiga kali lah ketemu konstituen ada kumpulan bagian IHN. Lebih dari tiga kali mau ketemu setiap bulannya sampai sekarang di antara aktivitas saya. Kegiatan yang ada di organisasi saya begitu." ¹⁴⁶

Selain itu, Ainun Jariyah juga mengakui bahwa citra partai yang mengusungnya pada pemilu tahun ini, yakni PKB, juga turut berpengaruh pada hasil perolehan suara yang beliau dapatkan, sebagaimana dijelaskan:

1

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ainun Jariyah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 13 Desember 2014.

¹⁴⁶ *Ibid.*,

"Pengaruh. Iya. Ya kalau selama ini mohon maaf saya bukan mengangkat dan menonjolkan partai yang buat kendaraan (berpolitik) saya ya – PKB. Kalau Sidoarjo kan *mbak'e* sudah tahu kan. Ya visi misinya, kinerjanya, ya di antaranya itu." ¹⁴⁷

Namun saat disinggung mengenai masalah sumbangan, Ainun Jariyah membantahnya dengan mengatakan:

"Saya ketua Muslimat mbak. Saya merasa terbantu dengan ketua-ketua Muslimat yang di ranting, dengan orang-orang ketua Jamaiyah, tanpa embel-embel saya anggota dewan, kalau saya punya rejeki selama ini ya apalagi kalau puasa mesti saya undang untuk buka bersama walaupun tidak banyak. Itu bukti saya merasa dibantu meskipun gini sempet kan *ndak* ada honornya, *ndak* ada apa-apanya." 148

Lantas beliau menambahkan:

"Yang saya bisa mengembangkan muslimat seperti itu, ndak mungkin kan saya terus langsung saya terjun ke bawah, tanpa dibantu dari masyarakat bawah – dari ketua Jamaiyah-Jamaiyah di ranting, sehingga wujud karena saya merasa terbantu saya berterima kasih maka ya meskipun satu tahun sekali itu ya ada lah mbak kecil-kecilan reward." 149

Berdasarkan penuturan di atas, Ainun Jariyah menjelaskan bahwa karena selama masa kampanye beliau sempat tidak memberikan sumbangan apa pun pada orang-orang di organisasi yang beliau ikuti, maka beliau baru bisa membalas jasa

¹⁴⁷ *Ibid.*,

¹⁴⁸ *Ibid.*,

¹⁴⁹ *Ibid*..

pendukungnya dengan memberikan *reward* kecil-kecilan satu tahun sekali setelah berhasil terpilih menjadi anggota dewan.

Adapun terkait lama masa kampanye yang dilakukan, Ainun Jariyah menuturkan:

"Kalau saya langsung terjun itu hampir 1 tahun untuk mengenal. Saya hanya pamit, tidak mengajak secara paksaan. Saya pamit, saya memberi tahu bahwa saya akan mencalonkan (diri) untuk menjadi (anggota) dewan." ¹⁵⁰

Selain melakukan turba (turun langsung ke bawah) selama 1 tahun serta mensosialisasikan citra partai dan citra caleg, Ainun Jariyah juga turut melakukan kampanye diskusi kelompok dengan mendekati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga kelompok-kelompok masyarakat di lingkungannya, berikut pernyataannya:

"Iya, saya mendekati (tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat) di kampung saya juga." ¹⁵¹

Untuk mobilisasi dana kampanye, Ainun Jariyah mengakui bahwa pengeluaran yang beliau keluarkan hanya untuk *banner* dan juga transportasi, berikut pernyataannya:

"Saya hanya untuk gambar-gambar aja — banner, untuk transportasi." 152

¹⁵⁰ *Ibid.*,

¹⁵¹ *Ibid.*,

¹⁵² *Ibid.*.

Selain Ainun Jariyah, Nunuk Lelarosanawati juga turut menggunakan strategi pemasaran terpusat dengan segmentasi psikografis, sebagaimana dijelaskan:

"Saya kampanyenya ke orang-orang yang tidak mampu ituitu aja mbak. *Ndak* (hanya) sumbangan aja (tapi) kita (juga) loyalitas (pada masyarakat) mbak. Saya perhatikan itu."¹⁵³

Adapun terkait bentuk operasionalnya, dengan gamblang Nunuk Lelarosanawati menjelaskan bahwa beliau melakukan turba (turun langsung ke bawah), berikut pernyataan beliau:

"Yang ngaruh itu (memang adalah) terjun langsung. Kalau misalkan dia (calon pemilih) sakit, yang nganter (ke Rumah Sakit) itu anak saya. Memberikan jasa kepada pemilih dan (itu) penting." ¹⁵⁴

Terkait citra partai dan juga citra caleg, sebagai caleg incumbent, Nunuk Lelarosanawati mengakui bahwa citra beliau di mata masyarakat masih kuat, hal ini sebagaimana dinyatakan:

"Citra saya iya, di sini pengaruh, artinya masih kuat lah ya." ¹⁵⁵

Adapun terkait mobilisasi dana kampanye, Nunuk Lelarosanawati menuturkan:

Wawancara dengan Nunuk Lelarosanawati, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 23 Desember 2014.

¹⁵⁴ *Ibid.*,

¹⁵⁵ *Ibid.*..

"(Untuk) baliho, *sticker*, tanggalan, nggak ada (yang lain) itu aja. Saya hanya itu aja. Nggak tau kok saya tahu-tahu banyak yang memilih. Jadi saat ini ya mbak yang paling dinanti (oleh masyarakat) uang nggak pengaruh (berapa pun jumlahnya), banyak yang mengeluarkan uang tapi *ndak* masuk, karena justru mereka (caleg) itu figurnya nggak ada. Jadi harus ke bawah harus turun (secara) langsung." ¹⁵⁶

Selain melakukan turba (turun langsung ke bawah), mensosialisasikan citra partai dan citra caleg, serta mobilisasi dana kampanye, Nunuk Lelarosanawati juga turut mengusung isu perempuan/gender pada pemilu legislatif 2014 lalu, sebagaimana pernyataan berikut:

"Iya (mengusung isu perempuan/gender), saya menjelaskan ke konstituen jangan sampai perempuan yang berkompeten itu kalah dalam berpolitik, jangan kalah dengan laki-laki, nggak boleh menganggap politik itu jelek, karena tidak semua orang, khususnya perempuan, yang terjun ke politik itu memiliki niat yang jelek." 157

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing anggota legislatif terpilih perempuan memiliki cara tersendiri untuk fokus pada satu atau beberapa segmen pasar tertentu. Sebagai caleg *incumbent*, Enny Suryani hanya akan melakukan pendekatan di desa-desa di mana saat pemilu legislatif 2009 beliau mendapatkan banyak suara. Sementara di desa yang saat

¹⁵⁶ Ibid.,

¹⁵⁷ *Ibid.*,

pemilu legislatif 2009 suara beliau kurang, beliau lebih memilih untuk tidak melakukan kampanye di daerah tersebut.

Adapun bentuk operasional dari strategi pemasaran terpusat dengan segmentasi geografik yang Enny Suryani lakukan ialah kampanye massa tidak langsung dengan memasang *banner* di titiktitik tertentu di daerah pemilihannya, yakni Sukodono, serta berpidato melalui radio lokal yang ada di desa tersebut. Selain itu, Enny Suryani turut melakukan kampanye massa langsung yang diadakan Partai Demokrat di GOR, Sidoarjo, dengan mengundang Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian melakukan pawai bersama massa pendukungnya. Adapun pawai yang dilakukan Enny Suryani dengan massa pendukungnya dimulai dari desa Sukodono, sampai ke GOR, Sidoarjo.

Untuk kampanye diskusi kelompok dengan cara mendekati tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun kelompok-kelompok masyarakat, Enny Suryani mengaku bila beliau tidak terlalu banyak melakukan kampanye dengan model seperti itu. Hal ini karena, menurut pengalaman beliau ketika mencalegkan diri pada pemilu legislatif 2009, banyak tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang tidak konsisten. Ini dikarenakan banyak dari mereka yang tergiur oleh caleg yang memiliki lebih banyak uang, sehingga muncul ketidakkonsistenan pada tokoh agama maupun tokoh masyarakat tersebut.

Selain itu Enny Suryani turut mengusung isu perempuan/gender selama pemilu, serta melakukan turba (turun langsung ke bawah) dengan menghadiri acara LPMK, kerja bakti, pengajian, PKK, maupun *event* yang ada di masyarakat. Terkait citra dari Partai Demokrat yang kini tengah terpuruk, Enny Suryani mengakui bila selama berkampanye beliau tidak terlalu terpengaruh dengan hal itu. Hal ini karena Enny Suryani lebih menonjolkan kinerjanya selama menjabat menjadi anggota dewan periode 2009-2014 di Kabupaten Sidoarjo dari pada menonjolkan citra partai yang tahun ini mengusungnya.

Karena masa kampanyenya yang sebentar, yakni hanya 1 bulan, Enny Suryani mengaku bahwa pengeluaran paling banyak hanya untuk *banner*, *sticker*, dan kartu. Di sela-sela waktunya yang sebentar tersebut, Enny Suryani turut melakukan sosialisasi cara pencoblosan pada masyarakat guna melengkapi strategi pemenangan serta kampanye yang beliau lakukan. Hal ini dilakukan mengingat saat pemilu legislatif 2014 kemarin, beliau berada di nomor urut besar.

Selain Enny Suryani, Ainun Jariyah turut melakukan strategi pemasaran terpusat untuk mengoptimalkan perolehan suara saat pemilu legislatif. Hanya saja beliau tidak melakukan strategi pemasaran terpusat berdasarkan segmentasi geografik, melainkan segmentasi psikografis. Pada pemilu legislatif 2014, Ainun Jariyah

hanya memfokuskan diri kepada masyarakat menengah ke bawah, di mana masyarakat menengah ke bawah memang merupakan masyarakat mayoritas di dapil 1 yang terdiri dari Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, terutama sekali di daerah sekitar tempat tinggal Ainun Jariyah sendiri yakni Tanggulangin.

Adapun terkait bentuk operasional dari strategi pemasaran terpusat yang Ainun Jariyah lakukan, beliau memulainya dengan melakukan turba (turun langsung ke bawah) yang dilakukan secara konsisten satu bulan tiga kali dengan menghadiri acara perkumpulan IHN, organisasi sosial-keagamaan yang beliau ikuti. Ainun Jariyah juga turut melakukan kampanye diskusi kelompok dengan mendekati tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok-kelompok masyarakat di daerah pemilihannya. Selain itu Ainun Jariyah juga mensosialisasikan citra partai dan citra caleg, serta melakukan mobilisasi dana kampanye.

Bentuk operasional yang kurang lebih sama juga turut dilakukan oleh Nunuk Lelarosanawati yang juga menggunakan strategi pemasaran terpusat dengan segmentasi psikografis pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo. Adapun untuk bentuk operasionalnya, Nunuk Lelarosanawati memilih untuk melakukan turba (turun langsung ke bawah), tidak hanya dengan memberikan sumbangan kepada calon pemilih atau masyarakat, namun juga memberikan jasa transportasi secara gratis kepada calon pemilih atau

masyarakat yang sedang sakit. Beliau juga turut mensosialisasikan citra partai dan citra caleg yang diyakini beliau masih memiliki pengaruh besar pada pemilu tahun lalu.

Selain itu Nunuk Lelarosanawati turut melakukan mobilisasi dana kampanye, serta mengusung isu perempuan/gender dengan menjelaskan kepada konstituen bahwa perempuan yang berkompeten jangan sampai kalah dalam berpolitik, terutama sekali dengan kaum laki-laki. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa politik itu jelek. Padahal, menurut pendapat beliau, tidak semua orang yang terjun ke dunia politik itu memiliki niat yang jelek atau tidak baik.

Strategi pemasaran terpusat yang hanya membidik satu atau beberapa segmen pasar ini terbukti efektif dengan berhasilnya ketiga anggota legislatif terpilih perempuan tersebut lolos ke parlemen.

Berdasarkan uraian di atas, strategi-strategi pemenangan yang dilakukan oleh anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, dapat digambarkan dalam tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

Strategi Pemenangan	Nama	Bentuk Operasional
Strategi Pemasaran Serba- Sama	Umi Khaddah	 Turba (turun langsung ke bawah) Kampanye diskusi kelompok Mensosialisasikan citra partai dan citra caleg Mengusung isu perempuan/gender
	Yunik Nur Aini	 Turba (turun langsung ke bawah) Kampanye diskusi kelompok Mensosialisasikan citra partai dan citra caleg
Strategi Pemasaran Serba- Aneka	Sulistyowati Nurul K.	 Kampanye dari pintu ke pintu Kampanye diskusi kelompok Mensosialisasikan citra partai dan citra caleg Sosialisasi cara pencoblosan Mobilisasi dana kampanye
	Juana Sari	 Kampanye massa tidak langsung Turba (turun langsung ke bawah) Mensosialisasikan citra partai dan citra caleg Mengusung isu perempuan/gender Sosialisasi cara pencoblosan
Strategi Pemasaran Terpusat	Enny Suryani	 Kampanye massa tidak langsung Kampanye massa langsung

	Kampanye diskusi kelompok
	• Mengusung isu
	perempuan/gender
	• Turba (turun langsung ke bawah)
	Mensosialisasikan citra
	partai dan citra caleg
	• Sosialisasi cara
	pencoblosan
	 Mobilisasi dana kampanye
Ainun Jariyah	• Turba (turun langsung ke
	bawah)
	Kampanye diskusi
	kelompok
	 Mensosialisasikan citra
	partai dan citra caleg
	Mobilisasi dana kampanye
Nunuk Lelarosanawati	• Turba (turun langsung ke
	bawah)
	Mensosialisasikan citra
	partai dan citra caleg
	Mobilisasi dana kampanye
	Mengusung isu
	perempuan/gender

Berdasarkan tabel 4.5 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemenangan anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo adalah strategi *marketing* politik dengan pendekatan STP yakni Segmentasi, *Targetting*, dan *Positioning* yang meliputi strategi pemasaran serba-sama, strategi pemasaran serba-aneka, dan juga strategi pemasaran terpusat. Adapun bentuk operasional dari ketiga strategi pemenangan tersebut yang dilakukan oleh anggota legislatif terpilih perempuan cukup beragam, yakni meliputi: *Pertama*, turba (turun langsung ke bawah) melalui LPMK, kerja bakti, pengajian,

PKK, maupun *event* yang ada di masyarakat. Turba yang dilakukan oleh sebagian besar anggota legislatif terpilih perempuan juga turut dimanfaatkan untuk memberikan sumbangan kepada calon pemilih atau konstituen sekaligus untuk sarana bersosialisasi pada masyarakat di daerah pemilihan. Kedua, sosialisasi cara pencoblosan pada masyarakat yakni menuntun masyarakat supaya tidak salah memilih caleg yang bersangkutan mengingat pada kertas pemilihan tidak terdapat gambar atau foto caleg, serta tidak sedikit caleg perempuan yang berada di nomor urut besar sehingga sosialisasi cara pencoblosan dibutuhkan untuk melengkapi kampanye yang telah dilakukan. Ketiga, kampanye. Kampanye yang dilakukan cukup beragam yakni kampanye dari pintu ke pintu dengan membuat tim per-TPS yang dikoordinatori oleh kordes (koordinator desa), kampanye diskusi kelompok dengan mendekati tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun kelompok-kelompok masyarakat untuk ber-silaturahmi sekaligus meminta restu, kampanye massa tidak langsung dengan berpidato melalui radio lokal di daerah pemilihan, iklan di media cetak, sekaligus memasang alat peraga berupa banner, spanduk, baliho, sticker dan kartu, serta kampanye massa langsung dengan mengikuti pawai yang diadakan oleh partai pengusung. Keempat, mengusung isu perempuan/gender, dan kelima, mensosialisasikan citra partai dan citra caleg.

Dari beragam strategi di atas dapat diketahui bahwa bentuk operasional dari strategi *marketing* politik dengan pendekatan STP yakni

Segmentasi, *Targetting*, *Positioning*, yang terdiri dari strategi pemasaran serba-sama, strategi pemasaran serba-aneka, maupun strategi pemasaran terpusat yang dilakukan oleh anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo masih dikategorikan sebagai bentuk operasional yang standar dengan cara-cara pendekatan yang masih bersifat konvensional dan biasa diterapkan sejak dulu.

Adapun Jack Trout dalam Sidarta mendefinisikan strategi sebagai beberapa cara untuk membuat kita menjadi tampak unik dibandingkan yang lain atau pesaing, serta memanfaatkan keunikan itu agar diingat pelanggan dan calon-calon pelanggan lalu mereka memiliki kerelaan untuk menggunakan produk yang kita produksi. Petuah tersebut dikenal dalam kompetisi bisnis. Namun demikian tidak ada salahnya bila merujuknya pada persaingan politik karena melalui strategi yang tepat dan juga didukung komitmen yang kuat maka kepastian terhadap pencapaian tujuan tinggal bergantung pada langkah-langkah politik yang dilakukan.

b. Fungsi Tim Sukses Bagi Anggota Legislatif Terpilih Perempuan

Dalam suatu pemilu, mustahil seorang kandidat atau caleg bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan atau dukungan dari pihak lain. Banyaknya pesaing, terbatasnya waktu serta beragamnya corak sosial masyarakat di suatu daerah pemilihan, membuat kandidat atau caleg membutuhkan sebuah tim yang berperan penting untuk membantu mensosialisasikan caleg di wilayah tersebut dengan penyesuaianpenyesuaian tertentu. Di sini lah tim sukses memainkan fungsi-fungsinya sebagai pihak yang berperan penting dalam pemenangan caleg di pemilu, yaitu:

1. Sosialisasi Caleg

Tim inilah yang akan mensosialisasikan para caleg di masyarakat. Daerah pemilihan yang luas, membuat tidak semua masyarakat mengenali caleg yang akan mereka pilih nantinya pada saat pemilu legislatif. Di sini lah tim sukses berperan penting dalam memperkenalkan caleg yang mereka dukung pada masyarakat, sebagai bentuk awal kampanye yang akan mereka lakukan.

2. Mempromosikan Caleg

Selain mensosialisasikan caleg, tim sukses juga berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan caleg, sehingga ketika terjun ke masyarakat, masyarakat sudah memiliki informasi terkait caleg tersebut. Dalam mempromosikan caleg, tim sukses akan lebih mengunggulkan prestasi, visi-misi, ataupun program kerja caleg tersebut. Di sini masyarakat diharuskan teliti dalam memilih wakil yang akan mereka pilih, karena tim sukses hanya akan mempromosikan caleg secara subjektif, dan bukannya objektif.

3. Sumber Informasi Terkait Kondisi Masyarakat dan Pemberi Saran

Kondisi masyarakat yang beragam, seringkali menjadi kendala tersendiri bagi caleg saat berkampanye. Di sini lah tim sukses memegang peran yang sangat penting bagi setiap caleg. Dalam kondisi masyarakat yang beragam serta hiruk pikuk pemilu yang tengah berlangsung, tim sukses akan memberikan informasi terkait kondisi masyarakat di daerahnya, untuk kemudian memberi saran kepada para caleg mengenai strategi yang tepat, sebelum caleg tersebut terjun secara langsung ke masyarakat.

4. Peta Politik

Sistem politik dengan suara terbanyak, secara otomatis akan membuat caleg maupun partai melakukan berbagai macam strategi untuk mendekati konstituen atau pemilih. Di sinilah tim sukses berfungsi sebagai referensi utama yang akan menggambarkan kondisi politik di daerahnya kepada para caleg. Dari informasi terkait kondisi politik yang didapatkan dari tim sukses tersebut, caleg dapat mengetahui bagaimana peran pendukung para pesaingnya serta strategi para pesaing yang digunakan di daerah tersebut, sehingga caleg bersama tim sukses dapat menyusun strategi yang lebih unik atau berbeda guna menarik perhatian konstituen.

5. Mengarahkan Konstituen

Selain mensosialisasikan, mempromosikan, memberi informasi dan saran, serta memberi gambaran terkait kondisi politik di daerah pemilihan, tim sukses juga berperan penting dalam mengarahkan konstituen untuk tetap setia kepada calegnya. Tim sukses akan meyakinkan konstituen secara konsisten bahwa caleg yang mereka dukung memang benar-benar layak untuk dipilih. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar konstituen benar-benar akan memilih caleg yang mereka dukung saat pemilu berlangsung.

6. Mengawal Perolehan Suara

Proses pengawalan perolehan suara dilakukan tim sukses sejak di TPS, Kecamatan, hingga sampai ke KPUD. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Terutama terkait perolehan suara yang bisa saja hilang secara tidak wajar karena dicuri apabila tidak dipantau secara maksimal.

7. Melaporkan Perkembangan Suara di TPS dan Menjadi Saksi

Tidak hanya mengawal perolehan suara, tim sukses juga turut melaporkan kondisi perkembangan suara di masing-masing TPS kepada calegnya. Selain itu, banyak caleg, khususnya caleg perempuan, yang menjadikan tim sukses sebagai saksi, sekalipun

partai pengusung juga telah memiliki saksi. Tim sukses yang berperan sebagai saksi ini harus melaporkan perkembangan suara di masing-masing TPS, dengan diberi imbalan sesuai dengan yang telah disepakati.

Dari pemaparan di atas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa tim sukses dapat menjadi penghubung psikologis dan juga penghubung organisasional antara caleg dengan masyarakat. Selain itu, tim sukses juga berperan penting dalam melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Tanpa adanya tim sukses, maka strategi pemenangan tidak akan berjalan dengan maksimal.

c. Efektifitas Tim Sukses Dalam Memenangkan Pemilu

Keberadaan tim sukses adalah wajib bagi masing-masing caleg. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak mungkin seorang caleg dapat berjalan sendiri untuk memperoleh suara yang maksimal sewaktu pemilu tanpa bantuan dari tim sukses. Hal ini sebagaimana dinyatakan:

"Iya, kecil kemungkinan caleg itu bisa jalan sendiri tanpa ada tim sukses. Bahkan, semakin banyak tim sukses semakin banyak kita meraih suara. Jadi di daerah itu umpama ada lima (tim sukses), minimal dari keluarganya sendiri kan bisa diajak gitu." ¹⁵⁸

¹⁵⁸ Wawancara dengan Juana Sari, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 18 Desember 2014.

_

Hal yang senada juga diungkapkan anggota legislatif terpilih perempuan yang lain:

"Pengaruh – itu kan lebih pendekatan saja ya. Jadi dengan adanya banyak tim sukses itu kan seumpama dia itu banyak teman – terus kita itu nggak tetangga – temannya di desa lain nanti 'ini loh, saya punya calon ini' ngajak sasarannya yang disana kan juga membawa (suara). Dari awalnya tiga dia punya teman di sana apalagi di dapil 1 (daerah pemilihan beliau) tapi kecamatan beda kan juga bisa menambah suara." 159

"Pengaruh. Dua-duanya sebenarnya harus jalan. Karena kalau tim sukses kita ya paling tidak kalau dia tidak bisa meraih tetangga sebelahnya, paling tidak satu keluarganya aja sudah cukup." ¹⁶⁰

Tetapi pendapat yang sedikit berbeda disampaikan oleh Sulistyowati. Meskipun beliau mengakui bila keberadaan tim sukses sangat penting adanya, namun beliau menyarankan untuk lebih pintar atau lebih selektif lagi dalam memilih tim sukses. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut:

"Itu amat sangat penting sebetulnya perannya karena kita tidak bisa turun sendiri (harus) melalui mereka nanti kan kita mau apa di desa itu mereka itu amat sangat kita butuhkan terutama informasi, atau langkah mereka juga kita butuhkan. Tapi itu memang lebih dari ibarat milih, jadi kita harus pinter milih tim, satu partai aja ada yang kadang-kadang *'oh enak melok wong iku, dikek'i duwek akeh'* akhirnya *katut*. Nah itu kan berarti kita harus pinter milih."¹⁶¹

Wawancara dengan Yunik Nur Aini, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 10 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁵⁹ Wawancara dengan Ainun Jariyah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 13 Desember 2014.

¹⁶¹ Wawancara dengan Sulistyowati Nurul K, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 23 Desember 2014.

Beliau lantas menambahkan:

"Ya karena saya turun saya juga tahu. Informasi itu cepet kita tangkap karena saya turun langsung. Orang belum ngomong saya sudah tahu. Pada saat begitu kita mengadakan pertemuan atau apa, mereka mungkin tidak menyangka sama sekali. Dan beberapa bulan saya datang ke rumahnya, di situ sudah ada bendera (partai) lain. Ya sudah." ¹⁶²

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota legislatif terpilih perempuan berikut:

"Pengaruh, tapi kadang tim sukses juga ada yang *nakalan*. Saya sendiri juga tidak harus mengiyakan semuanya. Karena ada pula mereka (tim sukses) yang punya wajah dua. Katakanlah, mereka itu tim, tapi itu kelihatannya saja kok. Katakanlah dari partai O, *'saya mendukung Ibu... ini bu... saya punya suara 1000'* kan *impossible*. Kalau satu orang satu desa punya suara 1000 *impossible* karena kita ada 12 partai. Satu desa maksimal hak pilih suara itu ada katakan 7000 atau 8000 itu hanya desa tertentu. Katakanlah kalau desa itu hanya 2000 suara dengan 12 partai yang masuk itu berapa untuk yang dapil 4 ini. Ada kurang lebih 80-an caleg untuk 3 kecamatan. Kalau 1 desa mungkinkah katakanlah mengatakan *'ini bu saya sanggup membawa 1000 orang' – impossible* sekali." ¹⁶³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya peran tim sukses sehingga caleg tidak hanya membutuhkan jumlah tim sukses berdasarkan kualitas, tetapi juga kuantitas. Sebagian besar anggota legislatif terpilih perempuan bahkan beranggapan bahwa semakin banyak tim sukses, maka akan semakin banyak pula jumlah suara yang akan mereka dapatkan. Hal ini karena, apabila tim sukses

¹⁶² *Ibid*..

¹⁶³ Wawancara dengan Enny Suryani, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 15 Desember 2014.

tidak bisa mengajak tetangganya untuk memilih caleg tersebut, maka tim sukses dapat mengajak keluarganya untuk memilih caleg tersebut dan itu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing caleg nantinya.

Karena pentingnya peran tim sukses untuk para caleg saat pemilu, secara otomatis caleg diharuskan untuk lebih selektif dalam memilih tim sukses sebagai orang kepercayaan yang akan membantu caleg meraih kemenangan politik. Hal ini dapat dikatakan wajar karena tidak sedikit pula tim sukses yang bermuka dua dan juga menjanjikan suara yang sudah terlihat *impossible* sekali untuk para caleg. Tim sukses seperti ini mudah dikenali karena cepatnya penyebaran informasi di kalangan tim sukses, turut membantu caleg untuk mengetahui mana tim sukses yang benar-benar setia mendukungnya, dan mana yang tidak.

Motivasi Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini diantaranya intensitas, arah, dan ketekunan. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori X dan Y Douglas McGregor maupun teori motivasi kontemporer, arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. 164

¹⁶⁴ http://id.wikipedia.org, diakses tanggal 1-1-2015.

Termasuk dalam berpolitik. Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut.¹⁶⁵

Hal ini sebagaimana dijelaskan:

"Saya berkecimpung di dunia politik itu karena saya waktu itu kan memang PNS, waktu itu di Candi. Kemudian saya mengundurkan diri karena saya ingin fokus ke keluarga malahan; Kebetulan ada usaha klinik saya di Porong, jadi saya wes *tak* fokus ke usaha saya klinik aja. Dengan sendirinya saya kenal banyak sekali pasien yang dari latar belakang, dari macam-macam permasalahan, itu mengusik dan menggugah hati saya yang kemudian dari partai Golkar itu mengajak untuk bergabung dengan partai untuk menjadi wakil rakyat." ¹⁶⁶

"Saya hanya ingin untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan (di Kabupaten Sidoarjo) karena saya kan lama (berkecimpung) di (dunia) pendidikan." ¹⁶⁷

"Paling tidak saya itu (bisa) menyalurkan aspirasi masyarakat (supaya) tidak merasa sungkan untuk mengeluarkan *unek-unek*-nya." ¹⁶⁸

"Disitu (legislatif) kita bisa punya banyak wawasan, terus kita bisa menyalurkan justru ada wadahnya gitu ketika kita ingin membantu masyarakat terutama."¹⁶⁹

Wawancara dengan Sulistyowati Nurul K, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 23 Desember 2014.

¹⁶⁵ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992), 131.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ainun Jariyah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 13 Desember 2014.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Yunik Nur Aini, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 10 Desember 2014

¹⁶⁹ Wawancara dengan Juana Sari, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 18 Desember 2014.

"Motivasi ya istilahnya memperjuangkan (hak-hak masyarakat)." ¹⁷⁰

"Motivasi saya itu sebenarnya saya tetap melanjutkan apa yang kemarin (tugas-tugas di Parlemen periode 2009-2014) belum terselesaikan dan masyarakat ini lebih paham lagi lebih selektif lagi terkait orang-orang yang mau dipilih." 171

"(Motivasi) saya itu harus bersinergi dengan DPR Pusat terus itu yang kita jalankan." ¹⁷²

Berdasarkan pernyataan di atas, motivasi dari anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legilsatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo sangatlah beragam. Ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal apabila ditinjau dari segi sumber motivasinya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legilsatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo yaitu untuk membantu masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan, menyalurkan aspirasi masyarakat, menganggap bahwa legislatif merupakan wadah yang tepat dalam membantu masyarakat, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Sementara dua dari tiga caleg *incumbent* memiliki motivasi yang sedikit berbeda saat mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, yakni ingin melanjutkan tugastugas periode 2009-2014 yang belum sempat terselesaikan serta menyinergikan DPRD Kabupaten dengan DPR Pusat agar berjalan selaras.

Wawancara dengan Enny Suryani, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 15 Desember 2014

¹⁷⁰ Wawancara dengan Umi Khaddah, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 5 Desember 2014

¹⁷² Wawancara dengan Nunuk Lelarosanawati, selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, 23 Desember 2014.

7. Melihat Konstitusi di Beberapa Negara

Meskipun dinamika politik perempuan di Indonesia berjalan dengan begitu dinamis, namun tidak ada salahnya bila kita membandingkan apa yang telah dilakukan perempuan di Negara-negara dengan latar budaya maupun sejarah yang jauh berbeda dengan di Indonesia guna mengukur tingkat partisipasi politik perempuan di Negara tersebut.

1. India

India menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai yang kuat. Majelis rendah disebut *Lok Sabha* (majelis rakyat) beranggotakan 545 orang. Majelis tinggi disebut *Rajya Sabha* (majelis negara bagian) dengan anggota 250 orang.

India, yang disebut sebagai negeri demokrasi terbesar itu, memiliki jaminan keadilan perempuan dalam konstitusi yang ditegaskan secara nyata. Hak perempuan terbebas dari segala bentuk diskriminasi atau pelarangan yang berdasarkan perbedaan gender, kasta, agama, ras atau daerah kelahiran yang dijamin dalam Undang-undangnya. Konstitusi India juga sudah menjamin bahwa laki-laki dan perempuan akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan.

Bahkan untuk keterwakilan perempuan dalam politik, konstitusi India jauh lebih progresif. Terutama jika dibandingkan dengan negaranegara lain di Asia. Jika di Indonesia keterwakilan itu diatur oleh peraturan setingkat undang-undang, maka konstitusi India sudah dengan tegas menjamin perempuan akan menempati perwakilan tingkat

desa/lokal yang disebut *Panchayat* sepertiga dari seluruh anggota parlemen.

2. Bangladesh

Hal yang tak kalah progresif juga telah diraih oleh Bangladesh, yang merupakan negara termiskin di dunia namun memiliki konstitusi yang tak kalah kuat dibandingkan dengan negara-negara lain yang jauh lebih maju secara ekonomi.

Hampir mirip dengan India, konstitusi Bangladesh juga menjamin hak-hak fundamental warga negara termasuk perempuan pada Bagian II tentang Fundamental *Principles of State Policy*.

Negara dan masyarakat harus menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam semua bidang kehidupan dan secara penuh berperan dalam kehidupan masyarakat dan semua unit kesejahteraan, termasuk sarana penerangan di tempat kerja, memberikan kesempatan perempuan untuk lebih aktif dalam pekerjaan dan belajar, menikmati pelayanan kesehatan, menikmati cuti *haid* serta menunaikan kewajiban kehamilannya.

3. Filipina

Di Asia Tenggara, representasi kaum perempuan di parlemen meningkat dari 10,2% di tahun 1990 menjadi 12,7% dua dasawarsa kemudian. Peningkatan jumlah perempuan di parlemen ini ternyata tidak

merata untuk seluruh kawasan tersebut. Ada beberapa kemajuan yang mengesankan, terutama di Filipina yang jumlah anggota parlemen perempuannya mencapai 17%. 173

Survei internasional juga menempatkan Filipina sebagai salah satu negara terbaik untuk urusan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, dan Negara ini pun juga satu-satunya dari Asia yang berhasil ada di posisi 10 terbaik dalam hal kesetaraan gender.

Sejarah mencatat, negeri ini sudah dua kali dipimpin presiden perempuan. Menurut catatan statistik, banyak perempuan Filipina memegang jabatan penting di dunia politik dan juga administrasi. Negara di Asia Tenggara ini juga kerap kali dipuji atas kemajuan di bidang pendidikan bagi perempuan.

Melihat partisipasi politik perempuan di negara-negara dengan latar budaya maupun sejarah yang jauh berbeda dengan di Indonesia tersebut, maka saat ini perlu disadari dan disikapi dengan kritis tetapi bijak oleh kaum perempuan di Indonesia bahwa tuntutan jaminan keterwakilan perempuan dengan kebijakan afirmatif melalui sistem kuota yang telah bergulir selama lebih dari tiga tahun gaungnya telah timbul dan tenggelam dan belum banyak dipahami sepenuhnya oleh banyak kalangan, khususnya kepada tingkat perumus kebijakan. Padahal, peningkatan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sangat penting untuk direfleksikan sekaligus

¹⁷³ Julie Ballington, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, (Jakarta: Ameepro, 2002), 229.

diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik karena akan membuat perempuan lebih berdaya untuk dapat terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapatkan perhatian. Hal ini terutama terkait dengan kesetaraan dan juga keadilan gender di berbagai aspek kehidupan yang selama ini termarginalkan. Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan juga publik. Selain itu, keberadaan perempuan dalam partai politik maupun lembaga legislatif akan lebih baik jika dapat ditunjukkan dengan kompetensi dan kompetisi yang cerdas dan intelektual sehingga keberadaan perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki, terutama juga oleh kaum perempuan itu sendiri.